

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT INVESTASI KOTA BATU
METODE AHP
(Analytic Hierarchy Process)**

SKRIPSI

Disusun oleh

**HERRY SUTANTO
0210213027**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

**” ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT INVESTASI
KOTA BATU METODE AHP (Analytic Hierarchy Process)”**

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Ide awal penulisan Skripsi ini timbul karena Arus globalisasi yang melanda hampir semua negara termasuk Indonesia mengakibatkan semakin tajamnya persaingan yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan dan seolah-olah tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Persaingan yang semakin tajam ini juga dirasakan oleh setiap daerah sehingga menuntut Pemerintah Daerah untuk menyiapkan daerahnya sedemikian rupa agar mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang saat ini banyak diincar oleh para investor adalah Kota Batu. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Batu merupakan salah satu daerah yang mempunyai daya tarik besar bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Bertolak dari hal ini, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di Kota Batu.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak CANDRA FAJRI A., SE., M.Sc, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
2. Bapak Dr. Ghozali Maski, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
4. Karyawan / Pegawai Jurusan Studi Pembangunan yang telah membantu dan mensupport dalam hal administrasi.
5. Istri dan anak saya yang telah mesupport dan menemani setiap hari dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Ika selaku rekan dan teman dalam hal berdebat atau sharing pendapat.
7. Semua teman di kampus rekan kerja yang ikut membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 3 Agustus 2009

Penulis

**ANALISIS INVESTASI DI KOTA BATU DENGAN
METODE ANALISIS HIERARKHI PROSES (AHP)**

SKRIPSI

**Disusun oleh
HERI SUTANTO
0210213027**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk meraih derajat sarjana ekonomi**



**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi, maka desentralisasi merupakan salah satu cara merespon globalisasi secara struktural di banyak negara, tanpa kecuali bagi Indonesia. Salah satu aplikasi konkrit desentralisasi adalah penerapan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya UU tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka daerah dituntut untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di suatu daerah, salah satunya adalah potensi pariwisata. Dengan otonomi daerah tersebut Pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah secara penuh dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya serta menetapkan dan mengusahakan sendiri dalam melaksanakan pengembangannya.

Salah satu daerah di Indonesia yang saat ini banyak diincar oleh para investor adalah Kota Batu, salah satu pusat wisata di Jawa Timur yang mempunyai daya tarik besar bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan diberikannya otonomi Daerah maka daerah ini semakin menata diri untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang ada dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya. Dan terbukti Kota Batu mampu mandiri dan berkembang pesat terutama di sector kepariwisataan Dan pesatnya perkembangan sektor pariwisata ini maka di kota ini banyak investor yang mendukung bidang kepariwisataan.

Membbaiknya iklim investasi di Kota Batu menjadikan daerah ini dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi peningkatan jumlah investor terutama terkait bidang pariwisata termasuk investasi di bidang perhotelan. Perkembangan jumlah investor tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah pendapatan daerah yang



berasal dari sektor tersebut, dimana dari tahun 2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 14,49%, tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 12,02%, 15,10% pada tahun 2006, kemudian Tahun 2007 meningkat lagi sebesar 21,53% serta meningkat sebesar 17,29% pada tahun 2008.

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi daya tarik investasi di Kota Batu?
- 2) Komponen apakah yang membentuk faktor daya tarik investasi di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kota Batu
- 2) Mendeskripsikan komponen pembentuk faktor daya tarik investasi di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Pemerintah Kota Batu agar dapat mengoptimalkan pengelolaan berbagai faktor yang mungkin dalam upaya meningkatkan kegiatan investasi di daerah tersebut
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang ada di lapangan atau masyarakat, khususnya masalah yang berhubungan pembangunan di bidang ekonomi
- 3) Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya di waktu mendatang dan bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan Investasi dalam Pembangunan Daerah

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada hakekatnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah serta pemanfaatan secara optimal potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi daerah ini merupakan suatu langkah strategis dalam menghadapi tantangan era globalisasi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merumuskan otonomi yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada daerah diharapkan dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya.

Era desentralisasi fiskal memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Peluang seperti ini tidak pernah ada selama Orde Baru, yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan fiskal dan subsidi serta

bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah.

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Menurut KPPOD (2002), faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerah yaitu :

1. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan adalah

..... mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (Williamson, 1985).

Suatu kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi.

Faktor kelembagaan digolongkan dalam 4 (empat) variabel, yaitu :

- a. Variabel Kepastian Hukum
- b. Variabel Aparatur dan Pelayanan
- c. Peraturan Daerah
- d. Variabel Keuangan Daerah

2. Kondisi Sosial Politik

Peranan kondisi sosial politik sebagai daya tarik investasi adalah bahwa pelaku investasi atau investor selalu mengharapkan daerah yang aman dari gangguan terhadap usaha yang dijalankan, pemerintah yang tanggap terhadap masalah keamanan, masyarakat yang terbuka terhadap kegiatan dunia usaha, konflik yang terjadi rendah. Dengan kondisi sosial politik yang baik maka suatu usaha akan dapat dijalankan dengan baik dan akan memberikan manfaat atau kegiatan bagi usaha bersangkutan.

Faktor sosial politik dibagi atas 3 variabel yaitu :

- a. Keamanan
- b. Kondisi sosial politik
- c. Budaya masyarakat

3. Faktor Ekonomi Daerah

Menurut Wasistiono (Suparmoko, 1997 :2), ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumberdaya alam (*natural resources/endowment factors*) maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat (*benefit*) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Faktor ekonomi daerah merupakan salah satu daya tarik investasi, karena pelaku usaha akan melakukan investasi pada daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, masyarakatnya memiliki daya beli cukup tinggi, tersedia bahan baku bagi usaha yang dijalankan. Dalam penelitian ini merupakan ukuran kinerja ekonomi daerah yang digunakan adalah potensi ekonomi (ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain) serta struktur ekonomi terhadap kegiatan usaha / investasi.

4. Faktor Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi (2003: 67), masalah ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam suatu proses produksi karena tenaga kerlah yang akan menjalankan kegiatan produksi. Faktor ketenagakerjaan adalah hal yang penting dalam suatu produksi yaitu menyangkut tingkat ketersediaan, kuantitas dan kualitas tenaga kerja karena akan berpengaruh langsung terhadap hasil produksi.

Faktor ketenagakerjaan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan investasi adalah ketersediaan tenaga kerja yang dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan, karena untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia. Selain ketersediaan hal lain sehubungan dengan ketenagakerjaan dalam kegiatan investasi adalah biaya Tenaga Kerja, yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Investor juga membutuhkan 'pasar' upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Semakin tinggi produktivitas kerja maka akan makin menguntungkan bagi kegiatan investasi.

5. Faktor Infrastruktur

Kontribusi infrasturktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah :

- Mempengaruhi marginal *productivity of private capital*
- Investasi publik komplementer terhadap investasi swasta
- Kontribusi terhadap peningkatan Kualitas Hidup

- Menciptakan amenities dalam lingkungan fisik (Parsetyo, 2009:1).

Faktor infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan investasi adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitas infrastruktur.

2.3 Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analitik Hierarki Proses (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty (1993) merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan model matematis. Dengan AHP kita dapat memandang masalah dalam kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan kita mengambil keputusan secara efektif (Gunawan, 1999:38).

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata variabel dalam suatu hirarki (tingkatan). Kemudian tingkat kepentingan tingkat variabel diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti pentingnya secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tertinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Perbedaan antara model AHP dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya (Permadi, 1992: 5).

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hirarki terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, sub kriteria-sub kriteria dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan di dalam struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan ini akan membentuk matrik dimana skala rasio diturunkan dalam bentuk eigenvektor utama atau fungsi-eigen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua pelaku investasi di Kota Batu, khususnya pelaku investasi di bidang perhotelan, baik pelaku usaha/kalangan pengusaha baik ataupun pengelola. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam beberapa tahun sejak 2003 hingga 2008 investasi yang paling menonjol dan terus berkembang adalah investasi di bidang perhotelan, karena usaha ini berkembang sejalan dengan makin berkembangnya sektor pariwisata di daerah tersebut. Besar populasi adalah 52 orang dari 52 usaha perhotelan bintang tiga dan bintang lima. Sampel adalah bagian yang diambil dari satu populasi atau wakil populasi yang akan dijadikan subyek (responden) dalam penelitian ini yang diharapkan dapat berikan hasil atau kesimpulan yang sama jika diambil dari keseluruhan populasi. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50% dari jumlah populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yaitu :

- 1) Variabel Kelembagaan, meliputi aspek aparatur dan pelayanan, perda, keuangan daerah dan kepastian hukum.
- 2) Sosial Politik, meliputi aspek keamanan, sosial politik dan budaya
- 3) Ekonomi Daerah, meliputi aspek potensi ekonomi dan struktur ekonomi.
- 4) Tenaga Kerja, meliputi aspek produktivitas, biaya dan ketersediaan.
- 5) Infrastruktur Fisik, meliputi aspek ketersediaan dan kualitas.

Pemilihan variabel ini didasarkan atas pernyataan KPOD mengenai faktor dominan yang terutama mempengaruhi tingkat investasi terhadap suatu daerah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*) dipandu dengan kuesioner *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terhadap responden.
- 2) Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai catatan, arsip atau dokumen dari berbagai pihak atau instansi terkait untuk memperoleh data penunjang guna melengkapi pembahasan tentang topik penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

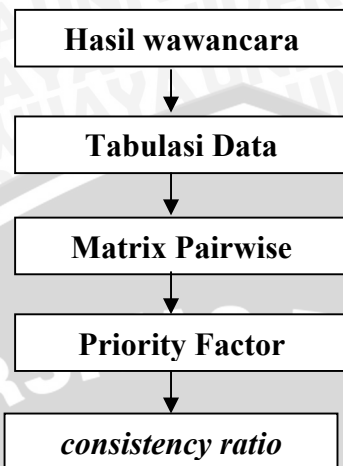
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang dikembangkan oleh Render.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan bobot KPI dengan menggunakan AHP adalah

- 1) Menentukan nilai prioritas KPI. Nilai prioritas dilakukan secara kualitatif tergantung pada keinginan “responden” bersangkutan.
- 2) Selanjutnya adalah membuat tabel perbandingan prioritas setiap KPI dengan membandingkan masing-masing KPI.
- 3) Dalam pengambilan keputusan melalui AHP, perlu dilakukan pembobotan kriteria-kriteria keputusannya. Setelah menentukan nilai bobot untuk kriteria masing-masing alternatif pada kolom matriks *pairwise comparison*, dapat dilakukan perhitungannya untuk menentukan pilihan alternatif yang diinginkan.

Tahapan dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Tahapan Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Hotel di Kota Batu

Seiring dengan makin meningkatnya bidang pariwisata di kota Batu, maka industri atau usaha di bidang perhotelanpun semakin meningkat guna menidukung kegiatan pariwisata. Sampai dengan akhir tahun 2008, jumlah hotel di Kota Batu mencapai 54 buah baik hotel bintang ataupun hotel melati. Setiap hotel mempunyai jenis dan jumlah kamar yang berbeda. Jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel berbeda untuk setiap jenisnya. Disamping mempunyai jenis kamar kamar standar, hotel juga menyediakan jenis kamar lain yang menyediakan fasilitas lebih baik. Untuk operasionalisasinya, jenis kamar standar mempunyai jumlah lebih banyak daripada jenis kamar yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jenis kamar standar sangat mendominasi jumlah kamar secara keseluruhan. Rata-rata hotel mempunyai jenis kamar standar lebih dari 50 % dari jumlah kamar yang dimiliki.

Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan di Kota Batu baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing, tingkat hunian usaha perhotelanpun mengalami peningkatan. Perkembangan usa perhotelan ini terkadi seiring dengan makin maraknya kegiatan pariwisata di kota tersebut. Pada tahun 2006 rata-rata tingkat hunian sebesar 44,46%, tahun 2007 meningkat menjadi 53,32% dan pada tahun 2008 menjadi 59,22%.

4.2 Deskripsi Subyek Penelitian

Tabel 4.1 : Daftar Responden Penelitian di Kota Batu

No	Nama Hotel	No	Nama Hotel
1	H. Agro Bukit Cemara Emas	15	H. Mustika sari
2	H. Agro Wisata Punten Mandiri	16	H. Nirwana
3	H. Arumdalu	17	H. Purnama
4	H. Asida	18	H. Putri Bulan
5	H. Aster	19	H. Royal Orchid
6	H. Batu Inn	20	H. Santoso
7	H. Batu Permai	21	H. Selecta
8	H. Garuda	22	H. Songgoriti
9	H. Grand Palem	23	H. Tawang Argo
10	H. Kartika Raya	24	H. Trisno Putro
11	H. Kartika Wijaya	25	H. Victory
12	H. Kusuma Agro Wisata	26	H. Wijaya
13	H. Metropole	27	H. Wisma Indah
14	H. Monalisa		

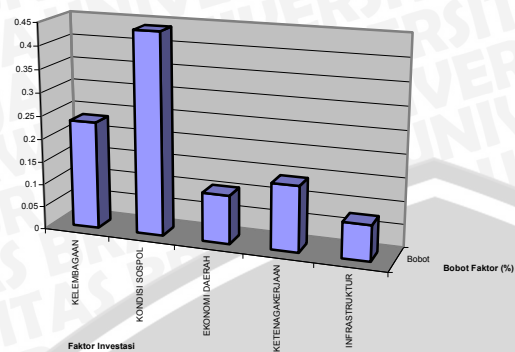
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu, 2008

Profil responden yang disurvei adalah sebagai berikut. Dari target 27 responden pengusaha perhotelan di Kota Batu, semua pengusaha berhasil diwawancarai. Pendidikan terakhir responden penelitian sebesar 54% responden merupakan lulusan S2, 21% lulusan S1, 10% lulusan diploma dan 15% lulusan SMA.

4.3 Peringkat Faktor Daya Tarik Investasi

Peringkat faktor dan variabel investasi di Kota Batu diberikan dalam gambar berikut. Gambar 4.2 memperlihatkan statistik peringkat faktor investasi di Kota Batu berdasarkan Kriteria Umum (Nilai Total).

Gambar 4.2 : Peringkat Faktor investasi Berdasarkan Kategori Umum (Nilai Total)



Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Kondisi Sosial Politik mendapat peringkat tertinggi daya tarik investasi dan memiliki bobot paling besar atau yakni sebesar 43,90%, faktor Kelembagaan sebesar 23,50% kemudian diikuti oleh faktor Tenaga Kerja sebesar 14,30% dan faktor Ekonomi Daerah menempati urutan keempat yakni sebesar 10,60%. Terakhir adalah faktor infrastruktur fisik sebesar 7,70%. Jadi menurut para pelaku usaha perhotelan di Kota Batu, faktor penentu investasi Kota Batu terutama dipengaruhi oleh faktor yang memiliki bobot terbesar yaitu Sosial Politik (Gambar 4.1).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menempati peringkat tertinggi sebagai daya penentu atau daya tarik investasi menurut pelaku usaha di Kota Batu adalah faktor kondisi sosial politik dengan bobot faktor sebesar 0,439 atau sebesar 43,90% dari total bobot. Peringkat tertinggi yang diperoleh faktor kondisi sosial politik di atas didukung oleh variabel keamanan sebagai variabel utama yaitu sebesar 0,50% dan kedua variabel lainnya yakni sosial politik dan budaya masyarakat masing-masing sebesar 25% dari bobot total faktor. Berdasarkan hasil penelitian ini berarti bahwa kondisi sosial politik suatu daerah merupakan daya tarik utama untuk investasi di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat, dan kondisi politik yang kondusif

Faktor sosial politik sebagaimana dinilai oleh para pelaku usaha menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama untuk kondisi keamanan dan konflik sosial. Ketika akan berinvestasi ke suatu daerah yang secara ekonomi dinilai menguntungkan maka terdahulu para investor akan mempertanyakan keadaan keamanan daerah tersebut. Karena meskipun menguntungkan dari segi ekonomi namun bila kondisi keamanan tidak terjamin, maka usaha atau investasi yang dilakukan akan gagal karena banyaknya gangguan keamanan.

Para pelaku usaha di Kota Batu menilai indikator-indikator yang tergabung dalam faktor sosial politik sangat baik. Berdasarkan penilaian para pelaku usaha di Kota Batu, di kota tersebut hampir tidak pernah terjadi gangguan keamanan usaha, aparat keamanan sangat cepat dalam menanggulangi gangguan keamanan, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun yang terjadi di masyarakat, hal inilah yang menurut para pelaku usaha menjadi salah satu faktor mengapa selama ini tidak dijumpai adanya gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha. Kondisi lingkungan usaha yang menjamin keamanan dan kepastian bagi pelaku usaha dan investor merupakan syarat utama kondisi lingkungan usaha yang kondusif.

Selain variabel keamanan dengan indikator-indikator pendukung pilihan prioritas terhadap faktor sosial politik sebagaimana telah disebutkan di atas, variabel lain yang turut menentukan pilihan prioritas pelaku usaha khususnya usaha perhotelan adalah variabel sosial politik dengan indikator-indikatornya keterbukaan birokrasi (pemerintah) kepada pelaku usaha untuk turut ambil bagian dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan dunia usaha. Pelaku usaha menilai bahwa Pemkot Batu senantiasa mengkomunikasikan setiap rencana kebijakan kepada masyarakat dan menjalin kerja sama secara harmonis dengan DPRD. Di samping itu, stabilitas politik dan

rendahnya konflik merupakan hal yang tak dapat diabaikan oleh dunia usaha dan akan sangat menentukan masuknya investor ke kota Batu.

Dan variabel terakhir sebagai penentu pilihan pelaku usaha terhadap faktor kondisi sosial politik adalah variabel budaya masyarakat. Suatu usaha yang dijalankan akan sangat memerlukan dukungan masyarakat untuk dapat berkembang dengan baik, usaha yang dijalankan memerlukan lingkungan masyarakat yang tidak diskriminatif, masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi yaitu semangat juang yang tinggi untuk maju dan persaingan yang sehat untuk mencapai kemajuan. Masyarakat Kota Batu sangat demokratis dan tidak diskriminatif, tidak membedakan pengusaha baik dari segi agama, ras, etnis/kebangsaan. Masyarakat mampu beradaptasi dengan berbagai pendatang dan berperilaku sopan dan ramah pada siapa saja. Hal ini membuat pelaku usaha merasa diterima oleh masyarakat dan menimbulkan optimisme bahwa usaha yang dikembangkan akan berhasil.

Peringkat tertinggi faktor kondisi sosial politik sebagai daya tarik investasi di Kota Batu ini ini tidak terlepas dari dukungan dan kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim politik yang kondusif, keamanan yang mantap, kecepatan aparat keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan menyebabkan iklim investasi di daerah ini sangat kondusif sehingga para pelaku usaha khususnya di bidang perhotelan merasa lebih bergairah untuk meningkatkan kinerja usahanya. Kecepatan aparat dalam merespon dan menanggulangi gangguan keamanan, membuat daerah ini sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi. Sementara kultur agraris dengan sikap terbuka bagi kehadiran dunia usaha dari luar, adalah keseharian yang ada di Kota Batu. Dinamika politik yang terjadi di daerah tidak mengganggu kegiatan usaha di sana.



BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kota Batu adalah faktor sosial politik dimana faktor tersebut mendapat prioritas tertinggi bagi investor sehingga memperoleh bobot dan peringkat tertinggi. Faktor kondisi sosial politik ini didukung oleh variabel keamanan sebagai variabel utama yaitu sebesar 0,50% dan kedua variabel lainnya yakni sosial politik dan budaya masyarakat masing-masing sebesar 25%. Hal ini terjadi karena suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat dan kondisi politik yang kondusif bagi dunia usaha.
2. Komponen pembentuk faktor daya tarik investasi di Kota Batu adalah variabel keamanan sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh factor kondisi sosial politik dan budaya masyarakat. Adanya jaminan keamanan yang sangat mendukung kegiatan para investor berkat kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kecepatan aparat keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan menyebabkan daerah ini sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dan membawa keuntungan bagi kegiatan investasi.

5.2 Saran

Atas dasar hasil penelitian ini peneliti menyampaikan beberapa saran :

1. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan senantiasa dapat menyusun peraturan daerah yang dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang baik.
2. Pemerintah dapat menyediakan data dan informasi terkini mengenai peluang investasi daerah, agar tidak investasi di bidang perhotelan saja yang berkembang namun investor di bidang lainpun dapat berkembang.
3. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi daerah.
4. Layanan perbankan agar memperhatikan dan mengakomodir kondisi dan keperluan pengusaha yaitu birokrasi dan prosedur yang lebih sederhana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan demikian akan semakin meningkatkan iklim investasi yang akan lebih membuka peluang bagi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.

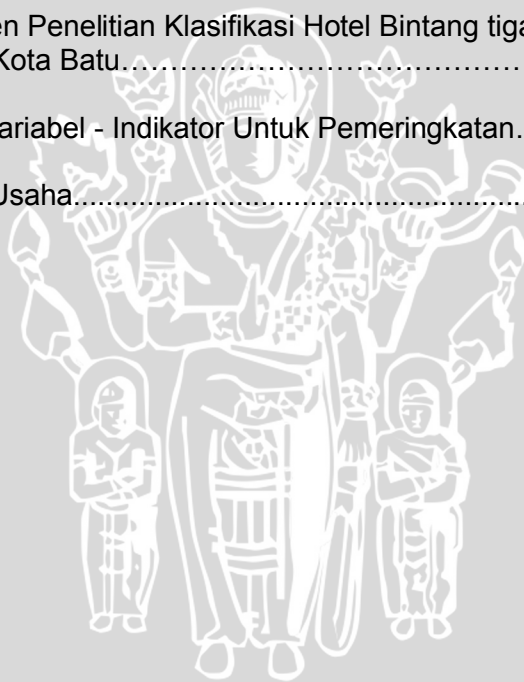
DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. Idris. 2006. *Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan – UM. Diakses dari <http://www.ekofoeum.or.id>.
- BKPM, 2005. <http://www.bkpm.go.id>.
- Brodjonegoro, Bambang 2000, *Otonomi Daerah Dan Kondisi Fiskal Indonesia*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Expert Choice inc Pennsylv Vania. 1992. Version 8.0 User Manual.
- Gaspersz Vincent. 1990. *Analisis Kualitatif untuk Perencanaan*. Bandung : Tarsito.
- Kadarsah Suryadi & M. Ali Ramdhani. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- KPPOD, 2002. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004a. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. 2004b. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Kuncoro, M. 2004c. *Trend dan Strategi Menarik Investasi ke Daerah dalam Lokakarya Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi*. Hotel Sahid Raya. Yogyakarta, 9-10 Agustus 2004. Tidak Dipublikasikan
- Kuncoro, Mudrajad. 2005a. *Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10 No.2, 2005.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005b. *Menanti Reformasi Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia*. Harian Kompas, 24 Januari 2005. Online dalam <http://www.mudrajad.com>.
- Kustituanto, Bambang dan Istikomah. 1998. *Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 14 No 2.
- Makmun. 2004. *Potret Perekonomian Daerah*. Harian Kompas 25 Maret 2004. Online dalam <http://www.kompas.com>.

- Marbun, B.N. 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal ekonomi Rakyat, Nomor 4 – Juli 2002.
- Nurmiyanto, Eko. 1994. Perumusan strategi kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT. Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra. Online <http://puslit.petra.ac.id/>
- Permadi, Bambang, 1992a. *AHP*. Terjemahan oleh Liana Setiono. Jakarta : Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Permadi, Bambang. 1992b. *Memutuskan dengan Analytic Hierarchy Process*. Pusat Antar Universitas — Studi Ekonomi, UI, Jakarta.
- REDI dan PEG. 2003. *Survei: Persepsi Pelaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah*. Surabaya: REDI.
- Render, Barry dan Ralph M. Stair Jr. 2000. *Quantitative Analysis for Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Malang. Bayumedia Publishing.
- Sarwedi. 2002. *Investasi Asing Langsung di Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 17 – 35, Online dalam <http://www.petra.ac.id>.
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sinaga, D. 2006. Iklim Investasi di Indonesia. Program Pnsca Sajana UPI YAI. Online dalam www.untad.org

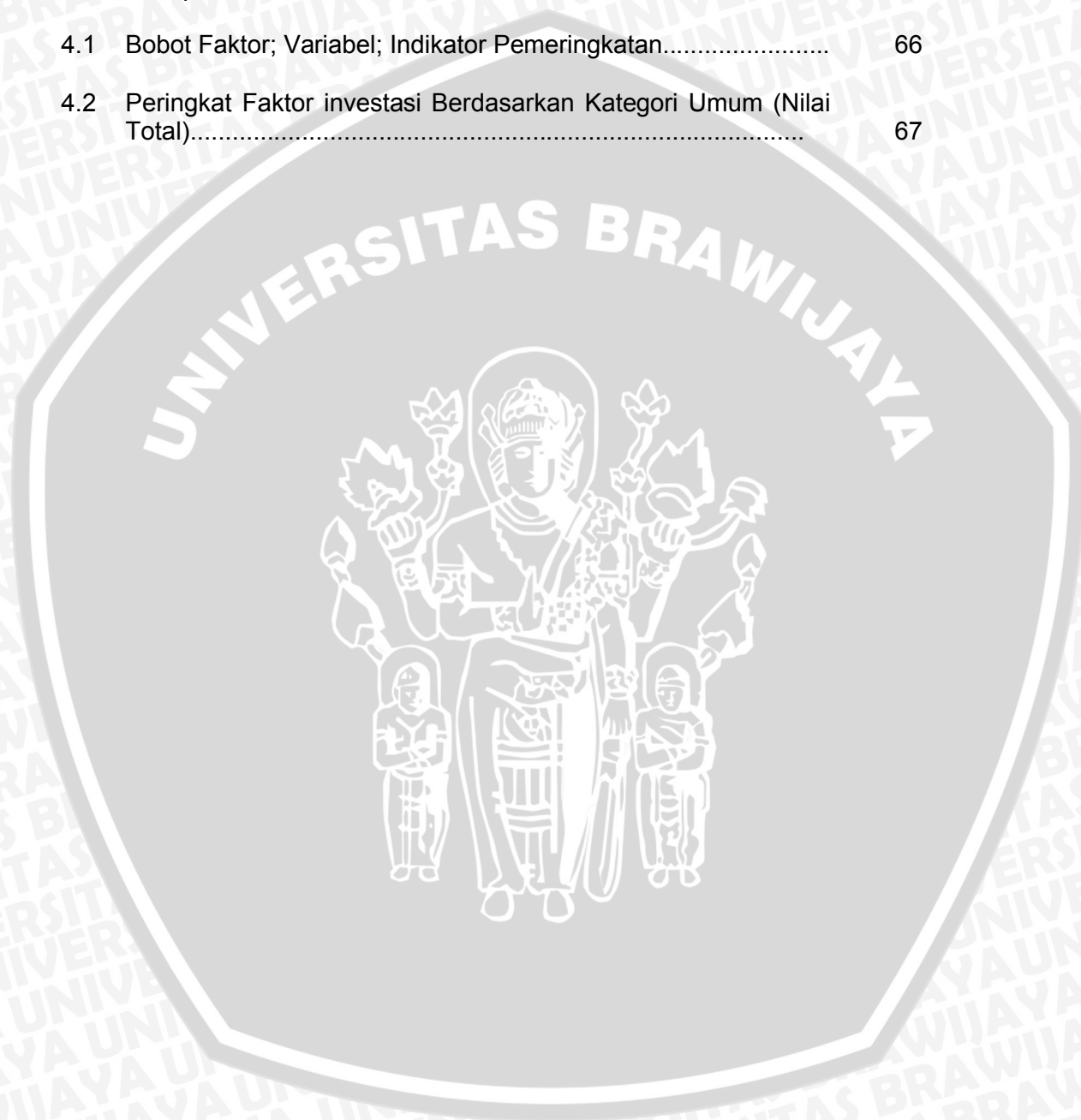
DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	hal
2.1	Perkembangan PAD Kota Batu Tahun Anggaran 2007.....	41
2.2	Perkembangan Obyek Wisata Kota Batu Hingga tahun 2008.....	42
2.3	Peluang investasi di Bidang Pertanian.....	43
3.1	Skala nilai prioritas KPI.....	50
3.2	Matriks Perbandingan Berpasangan.....	50
3.3	Pembobotan KPI.....	52
4.1	Daftar Responden Penelitian Klasifikasi Hotel Bintang tiga dan Bintang Lima di Kota Batu.....	56
4.2	Daftar Faktor - Variabel - Indikator Untuk Pemeringkatan.....	60
4.3	Persepsi Dunia Usaha.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	hal
3.1	Tahapan Analisis Data.....	53
4.1	Bobot Faktor; Variabel; Indikator Pemingkatan.....	66
4.2	Peringkat Faktor investasi Berdasarkan Kategori Umum (Nilai Total).....	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Pembangunan Daerah dan Investasi.....	8
2.2 Peranan Investasi terhadap Pembangunan Daerah	10
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi.....	13
2.4 Preferensi Pengusaha.....	34
2.5 <i>Analytic Hierarchy Process (AHP)</i>	35
2.6 Profil Daerah Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Populasi, Sampel dan teknik Sampling.....	45
3.3 Variabel Penelitian.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Metode Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Hotel di Kota Batu.....	54
4.2 Deskripsi Subyek Penelitian	55
4.3 Pengolahan Data dan Analisis Data	57
4.3.1 Prinsip Penggunaan AHP dalam Analisis Data	57

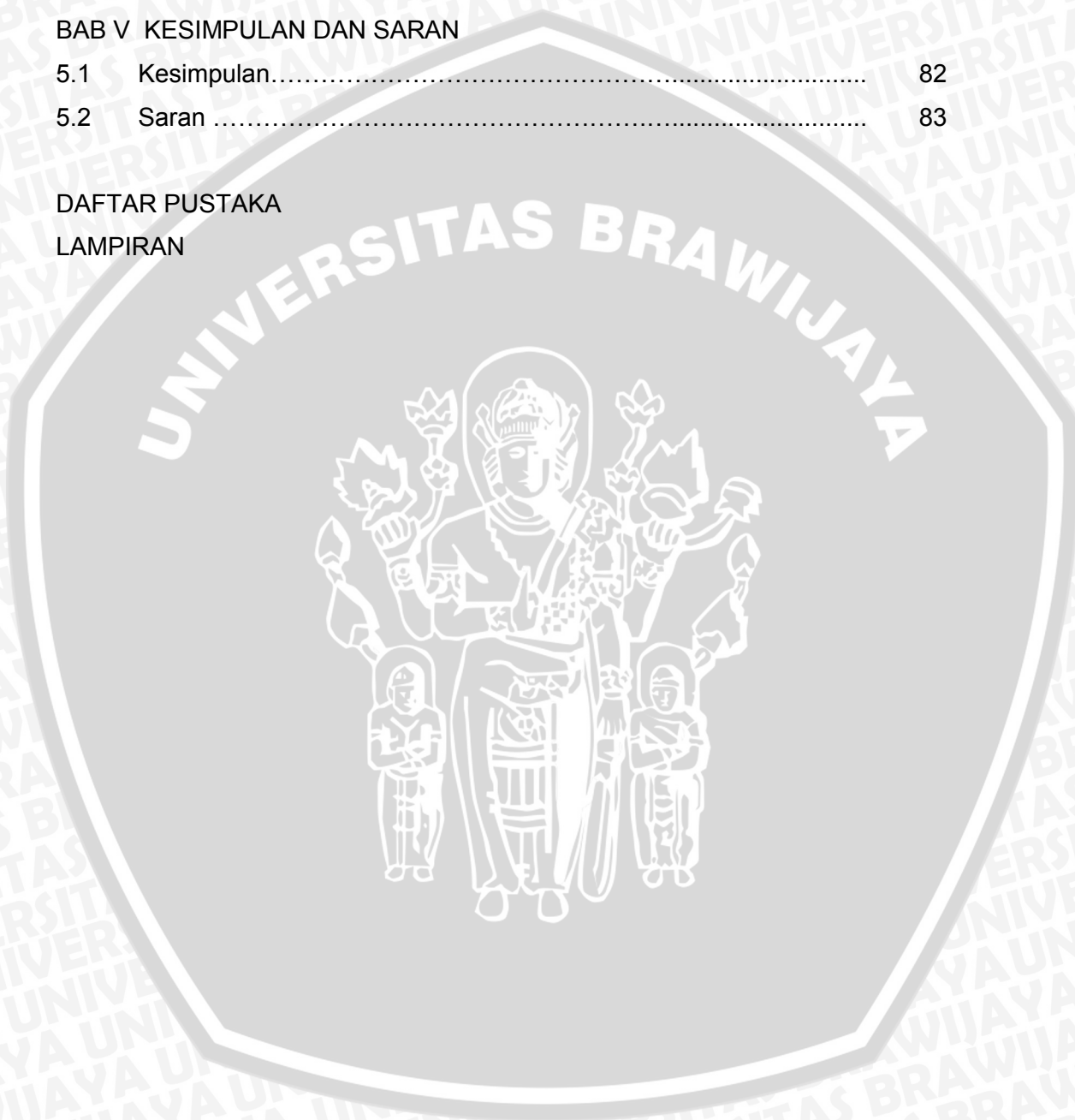
4.3.2	Pembobotan Faktor, Variabel, dan Indikator	58
4.3.3	Proses penentuan Prioritas Daya Tarik Investasi	65
4.3.4	Peringkat Faktor Daya Tarik Investasi.....	67
4.4	Persepsi Dunia Usaha.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi yang melanda hampir semua negara termasuk Indonesia mengakibatkan semakin tajamnya persaingan yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan dan seolah-olah tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Persaingan yang semakin tajam ini juga dirasakan oleh setiap daerah sehingga menuntut Pemerintah Daerah untuk menyiapkan daerahnya sedemikian rupa agar mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Banyak daerah-daerah yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada daerah tersebut, karena dengan adanya kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi suatu daerah, juga akan memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan jumlah *out put* yang dihasilkan dan terutama dapat meningkatkan 'daya saing' daerah bersangkutan. Hal tersebut di atas sebagaimana pendapat Kuncoro (2005:2), bahwa untuk dapat meningkatkan daya tarik terhadap investasi maka suatu daerah harus mempunyai daya saing perekonomian daerah yang relatif lebih baik dibanding daerah lainnya. Daya saing daerah ditentukan oleh faktor-faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik.

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi, maka desentralisasi merupakan salah satu cara merespon globalisasi secara struktural di banyak negara, tanpa kecuali bagi Indonesia. Salah satu aplikasi konkrit desentralisasi adalah penerapan otonomi daerah. Melalui pemberian otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa

mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu dan pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Selain itu daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

Kepariwisataan merupakan salah satu industri strategis di dunia. Hal ini disebabkan sebagian negara-negara yang ada di dunia mendapatkan devisa dari sektor kepariwisataan mereka. Selain sebagai industri terbesar, kepariwisataan juga merupakan kegiatan yang strategis jika ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya karena kepariwisataan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menanamkan rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Indonesia sebagai negara yang terkenal memiliki banyak potensi wisata baik alam ataupun budaya juga menjadikan pariwisata sebagai salah satu industri yang berperan dalam menambah devisa negara. Banyak obyek wisata yang ada di Indonesia yang telah dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara.

Dengan diberlakukannya UU tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka daerah dituntut untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di suatu daerah, salah satunya adalah potensi pariwisata. Dengan otonomi daerah tersebut Pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah

daerah secara penuh dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya. Serta menetapkan dan mengusahakan sendiri dalam melaksanakan pengembangannya. Wewenang diberikan kepada daerah karena Pemerintah daerah lebih mengerti dan memungkinkan untuk dapat mendayagunakan potensi pariwisata yang dimiliki dengan lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Salah satu daerah di Indonesia yang saat ini banyak diincar oleh para investor adalah Kota Batu. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Batu merupakan salah satu daerah yang mempunyai daya tarik besar bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan daerah Batu yang relatif masih alami serta potensi sumber daya alam yang dimilikinya merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, dan menjadikannya berkembang secara pesat dan cepat menjadi salah satu daerah tujuan dan pusat wisata di Jawa Timur. Banyak obyek wisata yang ditawarkan oleh Kota Batu kepada wisatawan. Dari waktu ke waktu terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke kota Batu, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata ini maka di kota ini banyak investor membangun villa serta hotel guna mendukung bidang kepariwisataan.

Potensi pariwisata di Kota Batu sangat prospektif untuk dikembangkan, khususnya wisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Sedangkan potensi pariwisata yang sudah dikenal adalah Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, Gunung Bokong dengan potensi sangat besar. Sedikitnya ada tiga obyek wisata baru bakal dibangun di Batu, yakni museum satwa, taman burung dan wisata bunga Bumiaji.

Belakangan ini perkembangan kepariwisataan yang dialami oleh daerah tersebut semakin meningkat. Karenanya tidak mengherankan jika terjadi persaingan di antara para investor dalam membangun dan mengembangkan investasi di kota tersebut. Dengan semakin membaiknya iklim investasi di Kota Batu maka dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi peningkatan jumlah investor terutama terkait bidang pariwisata termasuk investasi di bidang perhotelan.

Perkembangan jumlah investor tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari sektor tersebut, dimana dari tahun 2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 14,49%, tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 12,02%, 15,10% pada tahun 2006, kemudian Tahun 2007 meningkat lagi sebesar 21,53% serta meningkat sebesar 17,29% pada tahun 2008.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pendapatan daerah di Kota Batu setiap periode mengalami kenaikan signifikan. Penopang utama kenaikan tersebut adalah sub-sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini sesuai dengan ikon Kota Batu yang menempatkan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah. Di Kota Batu terdapat 33 tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata sejarah, yang didukung oleh berbagai fasilitas terutama fasilitas Hotel. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa investasi terbesar di Kota Batu adalah pada bidang usaha perhotelan dan penginapan lainnya seperti villa, yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2001 ke tahun 2002 perkembangan hotel sebesar 2,1%, dari tahun 2002 ke tahun 2003 peningkatan jumlah hotel mencapai sebesar 20,22%, pada tahun 2004 jumlah hotel mengalami peningkatan sebesar 11,93%, pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 14,51%, tahun 2006 meningkat 18,92%, tahun 2007 sebesar 8,57 dan pada

tahun 2008 meningkat lagi sebesar 27,72%. Jika diamati bahwa peningkatan yang kecil terjadi dari tahun 2001 ke tahun 2002. Keadaan ini disebabkan pada waktu ini Kota Batu baru berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Malang. Namun dari tahun 2002 ke tahun 2003 terjadi peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 20,22% dari tahun sebelumnya. Peningkatan terus terjadi dari tahun 2002 hingga tahun 2008. Hingga akhir tahun 2008 jumlah hotel di Kota Batu sebanyak 54 buah baik kelas berbintang maupun kelas melati.

Mengamati pesatnya perkembangan investasi di Kota Batu khususnya di bidang pariwisata tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah serta berbagai faktor yang mempengaruhi bidang tersebut. Dengan diberikannya otonomi Daerah maka daerah ini semakin menata diri untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang ada dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya. Dan terbukti Kota Batu mampu mandiri dan berlembang pesat. Walikota Batu Eddy Rumpoko mengatakan membaiknya iklim investasi tersebut tidak terlepas dari dipangkasnya proses birokrasi yang berbelit. Menurutnya, hal itu terkait erat dengan visi Kota Batu yakni mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat yaitu pelayanan yang mudah, cepat dan murah, yang meliputi penyediaan utilitas, kemudahan perijinan dan fasilitas umum lainnya utamanya dalam melayani investor dan calon investor.

Bertolak uraian ini, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di Kota Batu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai investasi tersebut di atas, maka dikemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi daya tarik investasi di Kota Batu?
- 2) Komponen apakah yang membentuk faktor daya tarik investasi di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kota Batu
- 2) Mendeskripsikan komponen pembentuk faktor daya tarik investasi di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Pemerintah Kota Batu agar dapat mengoptimalkan pengelolaan berbagai faktor yang mungkin dalam upaya meningkatkan kegiatan investasi di daerah tersebut
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang ada di lapangan atau masyarakat, khususnya masalah yang berhubungan pembangunan di bidang ekonomi
- 3) Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya di waktu mendatang dan bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya.

1.5 Batasan Penelitian

- 1) Indikator daya tarik investasi menggunakan indikator yang ditetapkan oleh KPPOD.
- 2) Analisis data menggunakan Analisis Hierarki Proses untuk mengetahui faktor prioritas dalam investasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Daerah dan Investasi

“Pembangunan” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*development*” ataupun bahasa Jerman “*Entwicklung*”. Dalam kamus Echols/Shadily, *development* diartikan sebagai perkembangan (*to await further developments*), pembangunan (*housing development*) dan pertumbuhan (*development of a child*). Sementara itu dalam sebuah kamus Jerman-Inggris *Entwicklung* diartikan sebagai *development* atau *evolution*.

Namun kurang tepat bila dipakai pengertian tersebut, karena pembangunan atau perkembangan yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan yang berlangsung di Eropa dan Amerika, dimana ‘perkembangan’ atau ‘pembangunan’ masyarakat berlangsung secara ‘alamiah’ sebagai akibat dari interaksi dari berbagai pilar masyarakat itu sendiri. Sedangkan perkembangan masyarakat yang terjadi di Indonesia (segaimana banyak negara ‘sedang berkembang’ yang lain) sebagian besar dilakukan, dibentuk dan ditentukan oleh kelompok penguasa (pemerintah). Dengan demikian adalah lebih tepat bila ‘pembangunan’ di Indonesia diartikan sebagai proses ‘perkembangan’ (*development*) masyarakat yang diarahkan oleh pemerintah (*government-driven development*). Pengertian ini menunjukkan bahwa di dalamnya ada unsur kesengajaan atau perencanaan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia sehingga terciptanya kondisi yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tujuan ini, secara eksplisit menyatakan kualitas kehidupan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, dan

cerdas. Intinya adalah keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat, haruslah terdistribusi secara adil. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 haruslah diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada hakekatnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah serta pemanfaatan secara optimal potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi daerah ini merupakan suatu langkah strategis dalam menghadapi tantangan era globalisasi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merumuskan otonomi yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada daerah diharapkan dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya.

Pelaksanaan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang semakin meningkat dan kompleks. Dengan fenomena seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk mencari alternatif

pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memacu upaya menggali sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan penerimaan secara kontinyu dan berkelanjutan, karena seluruh kegiatan pembangunan daerah harus dibiayai oleh pemerintah daerah itu sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan. Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditingkatkan, karenanya peranan investasi sangat diperlukan untuk memutar roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2 Peranan Investasi terhadap Pembangunan Daerah

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha; hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan. Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Tingkat kemajuan perekonomian Indonesia yang masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*), terlebih-lebih lagi setelah didera krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi (ekonomi,

sosial, politik), tetap menuntut campur tangan pemerintah secara lebih besar untuk pemulihan dan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan sosial secara lebih mendasar.

Proses perubahan sosial (pembangunan) tersebut perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui “*peran pemerintah bersama masyarakat*” dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Di samping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment=FDI*).

Era desentralisasi fiskal memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Peluang seperti ini tidak pernah ada selama Orde Baru, yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah. Dalam era Orde Baru, Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah daerah kurang diberi

keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat melakukan campur tangan terhadap daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di Daerah. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan tersebut terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah menimbulkan ketimpangan dan atau ketidakadilan, rendahnya akuntabilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah.

Menurut Makmun (2004:2-3), dalam dua tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, dampak positif ini belum dirasakan. Signal-signal penurunan ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah pada Pemerintah Pusat belum nampak, bahkan terdapat kecenderungan meningkat. Rata-rata rasio PAD terhadap PDRB pada tahun 1998/1999 adalah 0,0107% dan pada tahun 2002 menurun menjadi 0,0087%. Ketidakberdayaan daerah dalam menggali potensi PAD ini dapat disebabkan oleh kebijakan selama Orde Baru yang selama ini tidak memberikan motivasi kepada daerah untuk menggali potensinya sendiri. Hasil pantauan terhadap sejumlah daerah juga mendukung argumen ini. Di banyak daerah, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) pada umumnya tidak

pernah melakukan usaha-usaha untuk menggali potensi pendapatan daerah. Proyeksi penerimaan daerah pada umumnya hanya didasarkan pada pengalaman penerimaan tahun sebelumnya. Usaha untuk menggali potensi PAD belum banyak dilakukan oleh daerah. Namun sebaliknya di sejumlah kabupaten dan kota, Pemerintah Daerah terlalu kreatif menciptakan pungutan-pungutan daerah yang justru dapat mengganggu aliran investasi yang masuk. Padahal investasi swasta memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Dalam era desentralisasi fiskal ini, daerah diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Sehubungan dengan pembahasan mengenai daya tarik investasi daerah maka ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah : tenaga kerja dan produktifitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2,000 perusahaan pada 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menemukan bahwa alasan utama dibalik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya

kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

Kuncoro (2005: 3) menyatakan bahwa banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman.

Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja.

Jika berbicara soal penanaman modal, kita harus selalu melihat pada faktor-faktor yang akan mempengaruhi sektor usaha di negara kita. Hasil penelitian yang dilakukan secara periodik oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang bekerja sama dengan *The Asia Foundation* untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan penentu daya tarik investasi daerah/kota berdasarkan persepsi dunia usaha adalah faktor Kelembagaan, faktor Infrastruktur Fisik, faktor Sosial Politik, faktor Ekonomi Daerah dan faktor Tenaga Kerja.

Secara umum banyak sekali faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suatu negara, namun khusus untuk penanaman modal asing, ada 4 faktor penting yang harus selalu diperhatikan, yaitu :

1) Kepastian Investasi

Faktor kepastian terhadap investasi yang ditanamkan (*investment insurance*), menunjukkan pada derajat jaminan keamanan, prospek keuntungan, dan kemungkinan berkembangnya investasi yang ditanam sesuai dengan perkiraan dalam studi awal proposal usaha. Bagi investor, baik yang baru apalagi yang sudah menanamkan modalnya, hal ini adalah faktor yang sangat penting. Sehubungan dengan hal ini maka pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya memberikan jaminan yang setinggi mungkin dengan cara menciptakan situasi dunia usaha yang adil, transparan, dan dapat diprediksi (*predictable*). Peran pemerintah dalam faktor ini terutama pada tingkat kebijakan, yang harus selalu berpihak pada kepentingan semua pihak, dan kebijakan itu seharusnya berkesinambungan sehingga tercipta suatu kepastian pada dunia usaha.

Termasuk dalam lingkup faktor kepastian investasi adalah kepastian hukum dalam dunia usaha. Kepastian hukum adalah instrumen yang sangat penting bagi iklim investasi di Indonesia. Dan tentu saja ini merupakan suatu usaha panjang yang sangat berat. Jika pemerintah bisa menciptakan perlakuan adil dan transparan pada semua pelaku bisnis di Indonesia, sudah dapat dipastikan hal itu akan menjadi suatu daya tarik yang sangat kuat bagi investor, baik yang akan maupun yang sudah menanamkan modalnya.

2) Kemampuan Berkembang

Hal lain yang selalu menjadi pertimbangan investor adalah kemungkinan berkembangnya investasi yang ditanam (*investment capability growth*), atau tersedianya kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara optimal. Ada dua media penunjang faktor di atas, yaitu

tersedianya infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tersedianya infrastruktur dasar pada daerah-daerah dimana investasi kita harapkan dapat dilakukan adalah suatu yang kritical. Dalam kondisi persaingan usaha yang demikian ketat seperti saat ini, adalah sangat tidak bijaksana jika kemudian justru investor yang diwajibkan untuk membangun jaringan prasarana itu. Karenanya, pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah, yang harus selalu berupaya untuk melengkapi daerah tujuan investasi di wilayah mereka dengan infrastruktur dasar yang baik, seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan jalan raya. Dengan tersedianya hal tersebut kemungkinan investasi untuk tumbuh secara cepat akan sangat dimungkinkan.

Sumber daya manusia adalah faktor yang juga akan mempengaruhi ketertarikan investor. Akan lebih dapat menarik investor jika sumber daya masyarakat sekitar siap untuk mendukung jenis investasi yang diminati oleh investor.

3) Dukungan masyarakat dan pemerintah setempat

Dalam sebuah sistem negara modern, peran pemerintah mengalami pergeseran yang sangat fundamental, dari pemegang kekuasaan menjadi fasilitator. Pergantian peran ini pada dasarnya mengembalikan fungsi pemegang kekuasaan pada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Perubahan paradigma ini seharusnya secepatnya disadari tidak hanya pada tingkat pemerintah pusat, namun juga pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat pelaksanaanya.

Dalam kaitan dengan dunia investasi, seharusnya pemerintah daerah, tempat di mana investasi itu berada, berusaha keras untuk

menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga factor-faktor tersebut di atas dapat dipenuhi.

Di tengah masa transisi seperti ini, seringkali perusahaan hasil investasi asing menjadi sasaran cercaan masyarakat yang tidak proporsional bahkan seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus berperan proaktif untuk mencoba menjembatani permasalahan yang terjadi dengan adil, ikhlas, dan transparan. Sangat tidak menguntungkan jika dalam situasi seperti itu pemerintah daerah justru seolah-olah menjauh dan tidak mau untuk ambil resiko dan membiarkan perusahaan bersangkutan untuk menghadapi sesuatu yang bukan fokus usahanya.

Dengan syarat otonomi daerah sudah dijalankan, seharusnya pemerintah daerah secara proaktif melakukan kegiatan pembangunan kemasyarakatan di daerah tempat usaha para investor itu. Ini untuk secara perlahan dan fundamental mengurangi jurang kesenjangan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar dengan para pekerja di perusahaan bersangkutan.

Hal lain yang juga seharusnya disadari oleh pemerintah daerah adalah menjauhi permainan politik praktis untuk kepentingan sesaat dengan menggunakan perusahaan-perusahaan investasi asing ini sebagai lahan. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan investasi di daerah setempat.

Arief (2006 : 2), dalam tulisannya menyatakan terdapat beberapa factor yang mempengaruhi minat investasi baik investasi asing maupun investasi domestik, diantaranya :

- 1) Stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang tidak memadai.
Hal ini merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh pihak PMA. Keamanan dalam negeri relatif tidak aman, di beberapa daerah masih bergolak, ancaman teroris, dan lain-lain.
- 2) Tidak adanya kepastian hukum.
Kepastian hukum bagi para investor sangat mereka butuhkan dalam melaksanakan usahanya. Dengan kurangnya atau tidak adanya kepastian hukum menyebabkan mereka enggan menanamkan modalnya, malahan para investor asing yang sudah ada banyak memindahkan usahanya (relokasi) ke negara lain misalnya ke RRC, Vietnam, Kamboja, Korea, Singapura, Malaysia, dan lain-lain.
- 3) Kasus-kasus perburuhan yang sering dipolitisir misalnya : pemogokan, demonstrasi, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini juga akan sangat mengganggu dan merugikan usaha kegiatan mereka.
- 4) Meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal dalam negeri.
- 5) Munculnya negara yang sangat menjanjikan bagi PMA, misalnya RRC merupakan negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia dalam tahun-tahun mendatang, didukung oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang cukup tinggi, biaya produksi yang murah, serta ketersediaan tenaga kerja yang relatif murah dan memadai.
- 6) Ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*).
Timbulnya ekonomi biaya tinggi disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan yang merupakan biaya siluman (*invisible cost*). Biaya-biaya semacam ini sangat memberatkan mereka. Akibat ekonomi biaya tinggi ini beberapa perusahaan asing henggang dari Indonesia

dan mencari tempat penanaman modal di negara-negara yang lebih menguntungkan (*capital flight*) misalnya ke Malaysia, Singapura, dan lain-lain.

- 7) Prosedur yang panjang, berbelit-belit, dan sangat birokratis.

Misalnya pengurusan surat izin yang memakan waktu lama. Hal ini tentu akan menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi dan juga pemborosan waktu yang tidak sedikit sehingga sangat melemahkan dorongan investasi domestik.

- 8) Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi yang mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijaksanaan investasi.

- 9) Terjadinya gangguan keamanan di berbagai daerah.

Walaupun gangguan keamanan ini berskala lokal, namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional di masa-masa akan datang.

- 10) Minimnya faktor-faktor pendorong untuk merangsang para investor, misalnya: minimnya sarana dan prasarana, informasi investasi yang kurang, perangsang pajak yang kurang, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka ekonomi yang diharapkan dapat tumbuh dari dorongan investasi baik investasi luar negeri maupun dalam negeri sulit tercapai.

Menurut Sarwedi (2002:4), ada dua hal yang mempengaruhi kegiatan FDI di suatu negara (*host country*), yaitu *pertama*, lingkungan atau kerangka kebijakan (*policy framework*) dan *kedua*, faktor ekonomi (*economic determinants*). Pertimbangan ekonomi, di satu sisi menjadi pertimbangan dalam kegiatan FDI. Variabel ekonomi antara lain menyangkut akses pasar, sumber daya, dan faktor efisiensi. Kedua, *Policy framework* khususnya berkaitan dengan

regulasi yang berlaku di suatu negara. Kustituantu dan Istikomah (1998) mengatakan, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya *gap* antara realisasi dan persetujuan FDI di Indonesia, antara lain adalah *perceived risk*, *country risk*, stabilitas politik, tingkat korupsi baik *predictable* maupun *unpredictable corruption*, deregulasi bidang investasi, dan implementasi Otonomi

Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa begitu banyak dan kompleksnya faktor yang harus dipunyai sebuah negara atau daerah untuk menarik investor menuju daerah itu, sehingga Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah masih perlu melakukan serangkaian perbaikan, deregulasi dan penguatan jaringan sehingga akan menciptakan iklim investasi yang relatif kondusif sebagaimana diharapkan oleh para investor baik domestik maupun asing.

Guna menumbuhkan dan meningkatkan daya tarik investor, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus tetap fokus mempertahankan para investor yang sudah menanamkan modalnya, pemerintah juga diharapkan lebih proaktif untuk membantu investor yang mungkin saat ini menghadapi masalah kemasyarakatan.

Berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia, Kuncoro (2005: 7) menegaskan bahwa masih diperlukan beberapa reformasi (perubahan) yang mendasar, antara lain mencakup :

- 1) *Reformasi di bidang pelayanan investasi.*

Dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perijinan, dan '*lampu hijau*' dari BKPM atau BKPMMD untuk tahap awal. Tahap perijinan dan implementasi proyek iinvestasi sering tertunda karena untuk melakukan bisnis di Indonesia butuh waktu yang panjang dengan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5% dari rata-rata pendapatan. Koordinasi antar

tingkatan pemerintahan, baik vertikal maupun horisontal, sangatlah penting.

2) Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha adalah :

Penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perijinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang dan jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi.

3) Para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berperilaku sebagai '*predator*' dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis.

Hal ini merupakan tantangan besar, namun bila mau meningkatkan kinerja ekspor dan menumpas korupsi, maka terlebih dahulu harus 'membersihkan' jalan raya, pelabuhan, beacukai, dan kepolisian dari berbagai bentuk *grease money*.

4) *Reformasi peraturan* dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemda. Sehubungan dengan hal ini, maka agenda reformasi yang perlu dilakukan adalah pemerintah daerah baik propinsi atau kabupaten diberi kepercayaan dan wewenang untuk : (1) mengkaji semua Perda dari pemda kabupaten/kota di wilayahnya; (2) bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda.

Dengan adanya reformasi seperti disebutkan di atas, diharapkan akan membawa perubahan bagi iklim investasi dan implementasi pembangunan di Indonesia.

Dalam penelitian ini faktor yang diamati adalah :

1. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat.

Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya. Pendekatan ilmu biologi, ekologi atau lingkungan melihat institusi dari sudut analisis system lingkungan (*ecosystem*) atau sistem produksi dengan menekankan struktur dan fungsi system produksi atau system lingkungan kemudian dapat dianalisis keluaran serta kinerja dari system tersebut dalam beberapa karakteristik atau kinerja (*system performance atau system properties*) seperti produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, penyebaran dan kemerataanya.

Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Lembaga adalah

..... aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu

dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984).

..... aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 1985; 1986).

..... suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma prilaku, nilai budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986).

..... sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar anggota atau antar kelompok. Dengan definisi ini kebanyakan organisasi umumnya adalah institusi karena organisasi umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar anggota maupun dengan orang lain di luar organisasi itu (Nabli dan Nugent, 1989).

.....aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya (North, 1990).

..... mencakup penataan institusi (*institutional arrangement*) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini

apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (Williamson, 1985).

Berdasarkan definisi kelembagaan seperti tersebut di atas, maka suatu kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi.

Dalam kegiatan investasi, seorang investor sangat membutuhkan dukungan pemerintah seperti dalam hal perumusan kebijakan yang berhubungan dengan investasi yaitu peraturan daerah yang mengatur tentang kerangka acuan / aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi. Kebijakan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur pelayanan kepada masyarakat, perizinan, dan lain-lain, pelayanan publik yaitu kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan hal-hal lain terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan, kepastian dan penegakan hukum yaitu jaminan dari pemerintah atas kegiatan investasi dan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan peraturan dan keputusan sesuai dengan peraturan tanpa membedakan subyek hukum, serta kebijakan, strategi, dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah

dalam upaya untuk memperoleh dana, serta pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan, dan lain-lain) yang ditetapkan bagi dunia usaha (investor). Karenanya faktor kelembagaan dalam penelitian ini digolongkan dalam 4 (empat) variabel, yaitu :

- a. Variabel Kepastian Hukum
- b. Variabel Aparatur dan Pelayanan
- c. Peraturan Daerah
- d. Variabel Keuangan Daerah

2. Kondisi Sosial Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Politik didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau singkatnya kenegaraan seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara. Kata sosial diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum.

Menurut Ludito, et al (2004: 1), istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, merupakan rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komuniti yang digunakan sebagai acuan dalam berhubungan antar manusia. Dengan demikian sosial didefinikan sebagai segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat.

Berdasarkan kedua definisi di atas maka faktor sosial politik dapat diartikan sebagai tata aturan pemerintahan atau aturan yang ditetapkan dalam pemerintahan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat atau norma dan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu dalam masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Kondisi sosial politik adalah situasi atau keadaan pemerintahan atau aturan, norma yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur segala sesuatu dalam masyarakat atau keadaan yang berhubungan dengan situasi pemerintahan dan masyarakat dalam suatu daerah. Kelompok variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa kondusif aspek sosial, politik, keamanan, dan budaya dalam mendukung perekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah.

Peranan kondisi sosial politik sebagai daya tarik investasi adalah bahwa pelaku investasi atau investor selalu mengharapkan daerah yang aman dari gangguan terhadap usaha yang dijalankan, pemerintah yang tanggap terhadap masalah keamanan, masyarakat yang terbuka terhadap kegiatan dunia usaha, konflik yang terjadi rendah. Dengan kondisi sosial politik yang baik maka suatu usaha akan dapat dijalankan dengan baik dan akan memberikan manfaat atau kegiatan bagi usaha bersangkutan.

Berdasarkan uraian ini maka faktor sosial politik dalam penelitian ini dibagi atas 3 variabel yaitu :

a. Keamanan

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta.

b. Kondisi sosial politik

Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat. Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

c. Budaya masyarakat

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut. Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga

dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

3. Faktor Ekonomi Daerah

Ekonomi daerah secara umum identik keuangan daerah atau tingkat kekayaan yang dimiliki suatu daerah. Namun dari segi arti kata, maka ekonomi daerah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan produksi, distribusi, pemakaian barang-barang, kekayaan atau keuangan daerah.

Menurut Wasistiono (Suparmoko, 1997 :2), ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumberdaya alam (*natural resources/endowment factors*) maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat (*benefit*) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas maka ekonomi daerah dapat diartikan sebagai bentuk pengelolaan segala bentuk sumberdaya yang dimiliki suatu daerah baik untuk produksi, distribusi dan pengeluarannya untuk memberikan manfaat bagi daerah bersangkutan.

Faktor ekonomi daerah merupakan salah satu daya tarik investasi, karena pelaku usaha akan melakukan investasi pada daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, masyarakatnya memiliki daya beli cukup tinggi, tersedia bahan baku bagi usaha yang dijalankan. Dalam penelitian ini merupakan ukuran kinerja ekonomi daerah yang digunakan adalah potensi ekonomi (ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain) serta struktur ekonomi terhadap kegiatan usaha / investasi.

4. Faktor Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian ketenagakerjaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.

Menurut Mulyadi (2003: 67), masalah ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam suatu proses produksi karena tenaga kerjalah yang akan menjalankan kegiatan produksi. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan per satuan tenaga kerja.

Faktor ketenagakerjaan adalah hal yang penting dalam suatu produksi yaitu menyangkut tingkat ketersediaan, kuantitas dan kualitas tenaga kerja karena akan berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Selain itu pekerja yang merupakan sumber daya manusia adalah komponen utama dari pembangunan karena pelaku utama pembangunan adalah manusia. Untuk melihat gambaran tentang berapa besar nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yang diberikan oleh setiap pekerja pada suatu kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan menghitung produktivitas tenaga kerja.

Faktor ketenagakerjaan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan investasi adalah ketersediaan tenaga kerja yang dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan, karena untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia. Selain ketersediaan hal lain sehubungan dengan ketenagakerjaan dalam kegiatan investasi adalah biaya Tenaga Kerja, yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Investor juga membutuhkan 'pasar' upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Semakin tinggi produktivitas kerja maka akan makin menguntungkan bagi kegiatan investasi.

Berdasarkan hal ini maka dalam penelitian ini faktor ketenagakerjaan dibedakan atas variabel ketersediaan tenaga kerja, upah tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.

5. Faktor Infrastruktur

Infrastruktur adalah satu set struktur yang bergabung antara satu sama lain lalu membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur tertentu. Misalnya infrastruktur pengangkutan merangkumi landasan keretapi, jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan dan lain-lain elemen yang bersangkutan dengan pengangkutan (Wikipedia, 2009 : 1).

Infrastruktur merupakan prasarana dasar ekonomi, segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses misalnya usaha, pembangunan, proyek dalam suatu kegiatan ekonomi. Infrastruktur sangat penting dalam rangka menarik investasi pada suatu daerah, karenan

keberadaan infrastruktur secara langsung mempengaruhi produksi dan konsumsi dalam suatu daerah.

Kontribusi infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah :

- Mempengaruhi *marginal productivity of private capital*
- Investasi publik komplementer terhadap investasi swasta
- Kontribusi terhadap peningkatan Kualitas Hidup
- Menciptakan amenities dalam lingkungan fisik (Parsetyo, 2009:1).

Infrastruktur "mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Socrates: *"In order to function it all, a person needs the facilities and arrangements available from community, security, institutions, and economic goods, and that these can only be available when individuals support the concepts of community and the responsibilities that it entails"*. (Infrastruktur: *"elemen dasar dari suatu kota; bangunan utama dari suatu kegiatan; bangunan penunjang kegiatan"*).

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/1987 tentang Standar Konstruksi Bangunan Indonesia, Lamp.22 : *"Prasarana Lingkungan adalah jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik"*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerMenDagri No.2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota: *"Sistem utama jaringan utilitas kota (pola jaringan fungsi primer dan sekunder) seperti air bersih, telepon, listrik, gas, air kotor/drainase, air limbah"*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka termasuk dalam pengertian infrastruktur adalah fasilitas transportasi, bangunan institusional dan komersial, bangunan irigasi, drainase dan pengendali banjir, fasilitas air bersih dan air kotor, fasilitas penanganan limbah padat, pembangkit energi dan distribusinya, fasilitas telekomunikasi, fasilitas olahraga dan rekreasi serta infrastruktur kawasan pemukiman.

Enam kategori besar infrastruktur menurut Grigg :

- 1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
- 2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
- 3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
- 4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
- 5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
- 6) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

Fasilitas fisik Grigg:

- 1) Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi;
 - 2) Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali;
 - 3) Fasilitas manajemen limbah padat;
 - 4) Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara.
- Termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol;
- 5) Sistem transit publik;
 - 6) Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi;
 - 7) Fasilitas pengolahan gas alam;
 - 8) Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi;
 - 9) Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air;

- 10) Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran;
- 11) Fasilitas perumahan;
- 12) Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion (<http://tanimart.wordpress.com>).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan infrastruktur adalah berbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi, komunikasi, dan listrik), yang diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu daerah ke daerah lain atau ke negara lain dalam suatu kegiatan usaha. Faktor infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan investasi adalah ketersediaan infrastruktur, karena untuk kelancaran kegiatan usaha atau kegiatan investasi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi (telpon), dan sumber energi (listrik). Selain ketersediaan kualitas infrastruktur adalah hal lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan investasi yaitu kualitas infrastruktur. Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Untuk itu infrastruktur yang tersedia juga harus berada dalam kondisi baik. Kualitas infrastruktur selain memperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layak untuk digunakan, juga ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada.

Berdasarkan hal ini maka faktor infrastruktur dalam penelitian ini dibagi dalam dua variabel yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur.

2.4 Preferensi Pengusaha

Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dewasa ini setiap daerah di Indonesia terlibat dalam persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan para investor agar mau berinvestasi ke daerah yang bersangkutan, karenanya setiap daerah berupaya untuk berbenah diri guna dapat memenangkan persaingan tersebut. Berbagai pendekatan dilakukan untuk mendapatkan simpati para investor, melalui peningkatan sarana dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi maupun dengan pengembangan dibidang lainnya.

Keberhasilan suatu daerah tidak hanya dinilai dari seberapa banyak investor yang berhasil ditarik, namun juga bagaimana cara mempertahankan investor tersebut, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan bagi investor. Rasa puas dan tidak puas tersebut antara lain terletak pada seberapa besar kesenjangan antara harapan dengan prestasi yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan.

Persaingan untuk memenangkan investor telah menjadikan para investor sebagai pengambil keputusan yang diambil tersebut terutama berdasarkan preferensi masing-masing investor. Preferensi secara umum diartikan sebagai bentuk pilihan seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Preferensi merupakan suatu bentuk perilaku, yaitu tatacara atau kebiasaan-kebiasaan yang diperlihatkan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan pilihan terhadap sesuatu (hal). Dalam hubungannya dengan investasi, khususnya investasi yang dilakukan oleh pengusaha, maka preferensi pengusaha dapat diartikan sebagai tatacara atau kebiasaan-kebiasaan yang diperlihatkan oleh seseorang pengusaha dalam melakukan atau mengambil keputusan investasi.

Secara umum, investasi yang akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi. Dengan demikian maka

preferensi pengusaha terhadap investasi pada suatu daerah, umumnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merupakan daya tarik daerah tersebut. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk meningkatkan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Berbagai faktor yang berperan terhadap preferensi pengusaha diantaranya adalah faktor-faktor berikut : tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi.

2.5 Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metoda *Analytic Hierarchy Process* (AHP) merupakan teori umum mengenai pengukuran. Empat macam skala pengukuran yang biasanya digunakan secara berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala yang lebih tinggi dapat dikategorikan menjadi skala yang lebih rendah, namun tidak sebaliknya. Pendapatan per bulan yang berskala rasio dapat dikategorikan menjadi tingkat pendapatan yang berskala ordinal atau kategori (tinggi, menengah, rendah) yang berskala nominal. Sebaliknya jika pada saat dilakukan pengukuran data yang diperoleh adalah kategori atau ordinal, data yang berskala lebih tinggi tidak dapat diperoleh. AHP mengatasi sebagian permasalahan itu.

Analitik Hierarki Proses (AHP) dikembangkan oleh Saaty (1993) dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks atau tidak berkerangka dimana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi

sangat sedikit. AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan model matematis. Dengan AHP kita dapat memandang masalah dalam kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan kita mengambil keputusan secara efektif (Gunawan, 1999:38).

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata variabel dalam suatu hirarki (tingkatan). Kemudian tingkat kepentingan tingkat variabel diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti pentingnya secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tertinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Perbedaan antara model AHP dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya (Permadi, 1992: 5).

Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap 'ekspert' sebagai input utamanya. Kriteria ekspert disini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, pintar, bergelar doktor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang dilakukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Pengukuran hal-hal kualitatif merupakan hal yang sangat penting mengingat makin kompleksnya permasalahan di dunia dan tingkat ketidakpastian yang makin tinggi. Selain itu AHP juga menguji konsistensi penilaian. Bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsisten sempurna maka penilaian perlu diperbaiki atau hirarki harus distruktur ulang.

Keuntungan yang diperoleh bila kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menggunakan AHP antara lain :

- 1) Kesatuan : AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk keaneka ragam persoalan tak terstruktur.

- 2) Kompleksitas AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks
- 3) Saling ketergantungan AHP dapat menangani saling ketengantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tak memaksakan pemikiran linear.
- 4) Penyusunan hirarki : AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk rnemilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokan unsur yang senupa dalam setiap tingkat.
- 5) Pengukuran : AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan mewuj udkan metode penetapan prioritas.
- 6) Konsistensi : AHP melacak konsistensi logis dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan berbagai prioritas.
- 7) Sintesis : AHP menuntun kesuatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan sistem alternatif.
- 8) Tawar-menawar : AHP mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tuj uan mereka.
- 9) Penilai dan konsensus : AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesaikan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian.
- 10) Pengulangan proses : AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan serta pengertian mereka melalui pengulangan.

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hirarki terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, sub kriteria-sub kriteria dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan

di dalam struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan ini akan membentuk matrik dimana skala rasio diturunkan dalam bentuk eigenvektor utama atau fungsi-eigen.

2.6 Profil Daerah Penelitian

2.6.1 Profil Wilayah

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara.

Wilayah Kota Batu berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19°C. Rata-rata kelembaban nisbi udara 86% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari. Kota Batu dikarunia keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Luas wilayah Kota Batu kurang lebih 202.800 km². Secara astronomis Kota Batu terletak di 112°17'10,90"-122°57'11" Bujur Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45 Lintang Selatan.

Batas administratif wilayah Kota Batu sebagai berikut:

- Batas wilayah utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Batas wilayah selatan : Kabupaten Malang
- Batas wilayah Barat : Kabupaten Malang

- Batas wilayah Timur : Kabupaten Malang

Kota Batu memiliki wilayah seluas 197,087 km² yang dibagi dalam 3 wilayah kecamatan (Bumiaji, Batu, Junrejo), 4 kelurahan, dan 19 desa.

5.6.2 Potensi Daerah

Kota apel. Julukan itu telah lama melekat pada kota yang secara resmi baru berdiri dua tahun lalu. Apel merupakan produk khas yang menjadi andalan daerah yang atarannya berada di ketinggian tak kurang dari 600 m di atas permukaan laut serta dikelilingi banyak gunung (Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Bokong). Jenis tanah yang berada di kota Batu sebagian besar merupakan *andosol*, selanjutnya secara berurutan *kambisol*, *latosol* dan *aluvial*. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.

Banyak potensi wisata alam yang bisa dikembangkan dari Kota Batu ini. Hasil perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama dari Kota Batu adalah buah apel. Apel batu ini memiliki empat varietas yaitu manalagi, *rome beauty*, *anna*, dan *wangling*. Selain apel batu, Batu juga menghasilkan berbagai jenis buah lain seperti jeruk alpukat, nangka, dan pisang. Seperti Kecamatan Bumiaji yang produktif menghasilkan bermacam-macam buah-buahan, juga menjadi sentra produksi jeruk keprok batu, jeruk keprok punten, dan jeruk manis. Dengan nilai produksi mencapai 23.152 ton dari 24.205 pohon, jeruk-jeruk batu tersebut didistribusikan ke Surabaya, Bali, dan Jakarta.

5.6.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan Hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2007, jumlah penduduk Kota Batu tercatat sebesar 172.328 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 866 jiwa/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan

bahwa 85.818 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 86.510 jiwa adalah penduduk perempuan. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda. Dari data kependudukan di atas maka Kota Batu dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

5.6.4 Kondisi Perekonomian Daerah

Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Keindahan alam dan berbagai tempat tujuan wisata di sekitar Batu memang menjadi komoditas ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Sekitar 24 objek wisata resmi, yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap bulannya.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan menunjukkan bahwa jumlah Hotel pada akhir tahun 2007 sejumlah 399 buah, yang berarti meningkat sebesar 58,33% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa sector perekonomian terutama didukung oleh industri perhotelan.

5.6.5 Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam mengkaji kinerja ekonomi suatu daerah, apabila semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin baik kinerja ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi antara lain ditunjukkan oleh perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Dari tahun 2003 hingga 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Batu angkanya tampak terus meningkat. Penyumbang terbesar terhadap kenaikan angka pertumbuhan ekonomi tahun

2007 disumbang oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 45,54%, Sektor Pertanian menyumbang 19,48% dan penyumbang terbesar ketiga dari Sektor Jasa-jasa 15,21%.

5.6.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Asli Daerah

Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batu dilihat dari sektor penerimaan tahun anggaran 2007 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1: Perkembangan PAD Kota Batu Tahun Anggaran 2007

No	Sektor Penerimaan	Nilai (Rupiah)
1	Pajak Daerah	5.389.815.393,00
2	Retribusi Daerah	2.274.211.802,75
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah	726.182.500,75
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.893.064.684,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		13.283.274.381,07

Sumber : <http://www.kotabatu.go.id>

5.6.7 Perkembangan Investasi dan Pariwisata

1. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kota Batu sangat prospektif untuk dikembangkan, khususnya wisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Sedangkan potensi pariwisata yang sudah dikenal adalah Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, Gunung Bokong dengan potensi sangat besar.

Untuk meningkatkan wisatawan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai program proyek penunjang untuk mendukung sektor pariwisata, yaitu :

- 1) Pemasaran/promosi seperti pembuatan brosur, mengikuti pameran/travel, promosi melalui media cetak maupun media elektronik dan web site Kota Batu.
- 2) Pembinaan masyarakat khususnya di sekitar obyek wisata.

- 3) Pengadaan dan pemeliharaan sarana obyek wisata,
- 4) Pembangunan infrastruktur menuju obyek wisata, seperti peningkatan jalan, lapangan parkir, jaringan telekomunikasi dan listrik.

Sedangkan perkembangan obyek wisata di Kota Batu seperti table berikut.

Tabel 2.2 : Perkembangan Obyek Wisata Kota Batu Hingga tahun 2008

No.	Wisata	Obyek wisata
1	Recreational Garden	Taman Seribu Satu Bunga Square, Jatim Park, Selecta, Songgoriti, and Tirta Nirwana
2	Nature Tourism	Canggar hot water bathing place, Songgoriti Hot water bathing place, Coban Rais Water Falls, Coban Talun Water
3	Historical Tourism	Supo Songgoriti Temple, Ganesha Sculpture Torong Rejo, Ancient Dutch Grave Ritual, Cangar Japanese Cave, Tlekung Japanese Cave
4	Culture Tourism	Batu City Apple Sculpture, Batik Home Industry, Clay Ceramic Home Industry, Gong Home Industry, Onyx handy Craft Home Industry, Materia Medica Institute (Center for Family Medicinal Crops), and Jamu (Medicinal Herbs) Jeng Asih Home Industry
5	Specific interest Tourism	Sky Gliding, and Arboritum Sumber Brantas
6	Agro-tourism / Village Tourism	Kusuma Agro Tourism, Bunga Sidomulyo and Gunung Sari Villages, and Apple AgroTourism in Punten Village

2. Peluang Investasi

a. Sektor Pertanian

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura diarahkan melalui usaha intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi secara terpadu dengan memelihara sumber alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan produksi pangan melalui pasca panen secara intensif dalam rangka memperbaiki gizi masyarakat dan pendapatan petani. Potensi pertanian di Kota Batu cukup menarik untuk dikelola dan dikembangkan. Adapun potensi produk unggulan pertanian yang telah dikenal luas hingga ke mancanegara adalah apel. Tanaman apel tersebar di tiga kecamatan dengan areal tanam seluas 2.136 Ha yang dikelola oleh 7.110 petani dengan produksi rata-rata 31.612 ton/tahun.

Secara singkat peluang investasi di bidang pertanian seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 : Peluang investasi di Bidang Pertanian

Komoditi	Lokasi	Bahan baku yang tersedia	
		Luas areal	Produksi per tahun
Pertanian tanaman obat-obatan			
• Jahe	Junrejo	17.555 m2	70.220 Kg
• Lengkuas	Junrejo	289 m2	1.156 Kg
• Kunyit	Junrejo	100 m2	400 Kg
• Temulawak	Junrejo	21.000 m2	105.000 Kg
• Lobak	Bumiaji	8,5 Ha	36,50 ton
• Jamur	Bumiaji	15 Ha	480,6 ton
Hortikultura			
• Apel	Bumiaji	20,5 Ha	2,19 ton

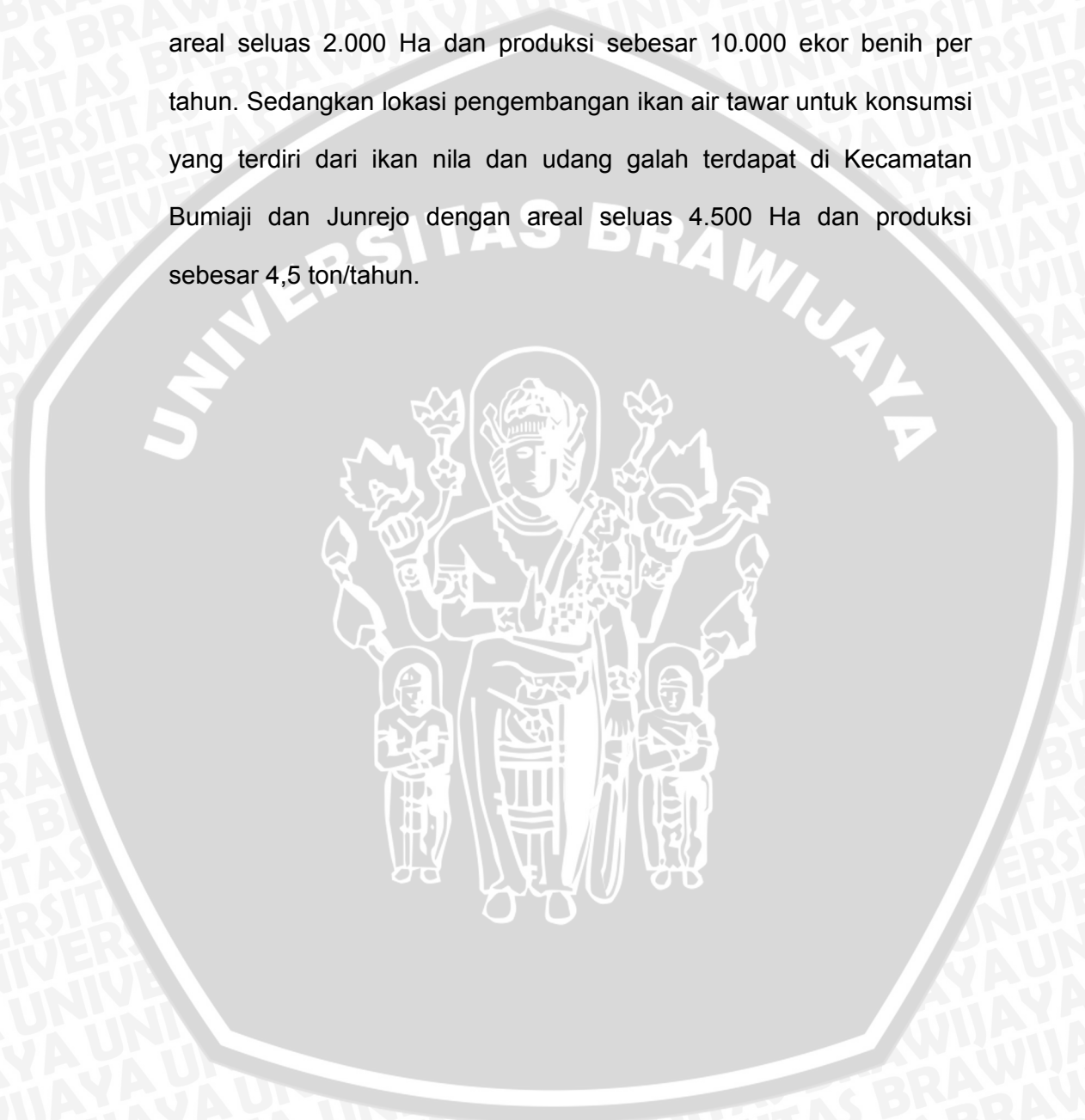
Sumber : www.kota-batu.com

b. Sektor Peternakan

Pembangunan peternakan dilakukan dengan sasaran pokok adalah peternakan modern, berbudaya industri berbasis pedesaan. Untuk meningkatkan jumlah populasi, produksi, konsumsi hasil ternak yang berupa daging, telur dan susu, serta penyerapan tenaga kerja dan peningkatan bagi peternak. Potensi peternakan di Kota Batu mempunyai harapan yang cukup menjanjikan khususnya untuk pengembangan sapi perah. Peluang investasi peternakan sapi perah terdapat di Kecamatan Bumiaji, Batu dan Junrejo dengan populasi mencapai 6.634 ekor dan produksi sebesar 7.842,5 ton/tahun.

c. Sektor Perikanan

Peluang investasi yang ditawarkan meliputi usaha perikanan ikan air tawar baik untuk konsumsi maupun ikan hias. Lokasi pengembangan ikan hias air tawar terdapat di Kecamatan Batu dengan areal seluas 2.000 Ha dan produksi sebesar 10.000 ekor benih per tahun. Sedangkan lokasi pengembangan ikan air tawar untuk konsumsi yang terdiri dari ikan nila dan udang galah terdapat di Kecamatan Bumiaji dan Junrejo dengan areal seluas 4.500 Ha dan produksi sebesar 4,5 ton/tahun.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey, yang ditujukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di lokasi penelitian, termasuk berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kegiatan investasi di daerah bersangkutan.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.2.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua pelaku investasi di Kota Batu, khususnya pelaku investasi di bidang perhotelan, baik pelaku usaha/kalangan pengusaha baik ataupun pengelola. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam beberapa tahun sejak 2003 hingga 2008 investasi yang paling menonjol dan terus berkembang adalah investasi di bidang perhotelan, karena usaha ini berkembang sejalan dengan makin berkembangnya sektor pariwisata di daerah tersebut. Besar populasi adalah 52 orang dari 52 usaha perhotelan bintang tiga dan bintang lima.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari satu populasi atau wakil populasi yang akan dijadikan subyek (responden) dalam penelitian ini yang diharapkan dapat berikan hasil atau kesimpulan yang sama jika diambil dari keseluruhan populasi. Dasar penggunaan sampel adalah karena populasi dinilai relatif homogen, karena umumnya investasi di Kota Batu selalu terkait dengan pariwisata atau untuk mendukung kegiatan pariwisata di daerah tersebut.

Semakin homogen suatu populasi maka ciri-ciri atau kriteria yang ditunjukkan oleh sampel yang digunakan akan lebih mendekati kriteria atau ciri-ciri populasi pada umumnya. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50% dari jumlah populasi.

3.2.3 Teknik Sampling

Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengambil sebagian dari populasi sehingga dapat mempresentasikan permasalahan atau ciri-ciri yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dari populasi. Adapun kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Investasi dibidang perhotelan dan terdaftar secara resmi di Kota Batu.
- 2) Merupakan perhotelan yang dikategorikan dalam Hotel Bintang tiga dan bintang lima. Hal ini dengan pertimbangan bahwa perhotelan dalam kategori tersebut memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pendapatan Pemerintah setempat.
- 3) Beraktivitas di Kota Batu minimal selama 5 tahun. Hal ini diasumsikan bahwa dengan kurun waktu tersebut berinvestasi di Kota Batu, dapat memberikan jawaban yang representatif, karena dapat memberikan jawaban-jawaban sesuai pengalaman dalam berinvestasi di ndaerah bersangkutan.
- 4) Merupakan pemilik sekaligus pengelola, hal ini dengan asumsi bahwa sebagai pemilik sekaligus pengelola maka responden tersebut merupakan orang yang paling tahu dengan keadaan usaha yang dikelolanya dan

bagaimana langkah kebijakan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan kriteria di atas maka diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 orang sampel, yang merupakan pemilik sekaligus pengelola usaha bidang perhotelan.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yaitu :

- 1) Variabel Kelembagaan, meliputi aspek aparatur dan pelayanan, perda, keuangan daerah dan kepastian hukum.
- 2) Sosial Politik, meliputi aspek keamanan, sosial politik dan budaya
- 3) Ekonomi Daerah, meliputi aspek potensi ekonomi dan struktur ekonomi.
- 4) Tenaga Kerja, meliputi aspek produktivitas, biaya dan ketersediaan.
- 5) Infrastruktur Fisik, meliputi aspek ketersediaan dan kualitas.

Pemilihan variabel ini didasarkan atas pernyataan KPPOD mengenai faktor dominan yang terutama mempengaruhi tingkat investasi terhadap suatu daerah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*) dipandu dengan kuesioner *Analytical Hierarchy Proccess* (AHP) terhadap responden.
- 2) Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai catatan, arsip atau dokumen dari berbagai pihak atau instansi terkait untuk memperoleh data penunjang guna melengkapi pembahasan tentang topik penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang dikembangkan oleh Render. *Analytic Hierarchy Process* merupakan suatu metoda dalam pemilihan alternatif-alternatif dengan melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana yang digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan berdasarkan ranking. Metoda yang digunakan berdasarkan proses AHP (saaty, 1993), disusun sesuai dengan sifat-sifat rasional (dana, manfaat ekonomi, manfaat social, teknis dan kebijakan) untuk menyeleksi yang terbaik dari sejumlah alternatif dan dievaluasi dengan memperhatikan beberapa kriteria.

AHP didesain berdasarkan hal yang bersifat intuitif dan rasional untuk menyeleksi yang terbaik dari sejumlah alternatif yang dievaluasi dengan memerhatikan beberapa kriteria. Dalam proses ini, pembuat keputusan melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan untuk penyusunan alternatif-alternatif pada urutan ranking/prioritas.

Pemilihan alat analisis didasarkan pertimbangan bahwa AHP merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan dengan input utama persepsi manusia. Dengan AHP kita dapat memandang masalah dalam kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan kita mengambil keputusan secara efektif.

Kelebihan lain dari metode ini adalah kemampuannya untuk menguji tingkat kekonsistesian pertimbangan-pertimbangan oleh pengambilan keputusan. Dengan menggunakan AHP maka permasalahan yang sangat kompleks dan tidak terstruktur dapat dijabarkan dalam berbagai faktor yang mempengaruhinya yang kemudian disusun menjadi suatu kerangka yang membentuk hierarki.

Hierarki ini merupakan kerangka pengambilan keputusan yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi secara menyeluruh. Dari penentuan prioritas dengan menggunakan metode AHP diperoleh beberapa strategi yang dapat digunakan terutama dalam usaha meningkatkan motivasi daerah untuk meningkatkan daya tarik terhadap investasi.

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan masalah kompleks yang tidak terstruktur dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata variabel dalam suatu hirarki (tingkatan). Kemudian tingkat kepentingan tiap variabel diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti pentingnya secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tertinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.

AHP membantu dalam menentukan prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisa perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria. Dalam sistem pengelolaan kinerja yang dimaksud dengan kriteria tersebut adalah *Key Performance Indicators* (KPI). Kaidah pembobotan menyatakan bahwa nilai bobot KPI berkisar antara 0 - 1 atau antara 0% - 100% jika kita menggunakan prosentase. Jumlah total bobot semua KPI harus bernilai 1 (100%). Tidak ada bobot yang bernilai negatif (-).

Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan bobot KPI dengan menggunakan AHP adalah

- 1) Menentukan nilai prioritas KPI. Nilai prioritas dilakukan secara kualitatif tergantung pada keinginan "responden" bersangkutan. Biasanya orang lebih mudah mengatakan bahwa KPI A lebih penting daripada KPI B, KPI B kurang penting dibanding dengan KPI C dsb, namun mengalami kesulitan menyebutkan seberapa penting KPI A dibandingkan KPI B atau seberapa kurang pentingnya KPI B dibandingkan dengan KPI C. Untuk

itu kita perlu membuat tabel konversi dari pernyataan prioritas ke dalam angka-angka. Contoh tabel skala nilai prioritas KPI seperti berikut :

Tabel 3.1 : Skala nilai prioritas KPI

Nilai	Tingkat prioritas
1	KPI A sama penting dibanding dengan KPI B
3	KPI A sedikit lebih penting dibanding dengan KPI B
5	KPI A lebih penting dibanding dengan KPI B
7	KPI A sangat penting dibanding dengan KPI B
9	KPI A jauh sangat penting dibanding dengan KPI B
2,4,6,8	*) nilai tengah-tengah

2) Selanjutnya adalah membuat tabel perbandingan prioritas setiap KPI dengan membandingkan masing-masing KPI. Sebagai contoh: Jika kita mempunyai 4 KPI, maka kita membuat matrik perbandingan ke-4 KPI tersebut. Misalkan dari proses membandingkan antar KPI diperoleh nilai prioritas KPI sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Matriks Perbandingan Berpasangan

	KPI A	KPI B	KPI C	KPI D
KPI A	1	1/2	1/5	1/3
KPI B	2	1	1/3	1
KPI C	5	3	1	1/2
KPI D	3	1	2	1

Cara mengisinya adalah dengan menganalisa prioritas antara KPI baris dibandingkan dengan KPI kolom. Dalam prakteknya kita hanya perlu menganalisa prioritas KPI yang terdapat di bawah pada garis diagonal (kotak dengan warna dasar putih) yang ditunjukkan dengan warna kuning atau di atas garis diagonal yang ditunjukkan dengan kotak warna hijau.

Hal ini sesuai dengan persamaan matematika yang menyebutkan **jika $A:B= X$, maka $B : A = 1/X$.**

Contoh: jika prioritas KPI B (baris) : KPI A (kolom) = 2, maka prioritas KPI A (baris) : KPI B (kolom) = $1/2$ (*lihat rumus persamaan perbandingan matematika di atas*). Sehingga prioritas setiap KPI antara **KPI A : KPI A = 1, KPI C : KPI A = 5, KPI C : KPI B = 3, KPI D : KPI A = 3, KPI D : KPI B = 1, KPI D : KPI C = 2.**

Dari susunan matriks perbandingan berpasangan dihasilkan sejumlah prioritas, yang merupakan pengaruh relatif sejumlah elemen pada elemen di dalam tingkat yang ada di atasnya.

- 3) Dalam pengambilan keputusan melalui AHP, perlu dilakukan pembobotan kriteria-kriteria keputusannya. Bobot didefinisikan sebagai sebuah nilai yang ditetapkan pada suatu kriteria evaluasi yang mengindikasikan kepentingannya relatif terhadap kriteria lain berdasarkan suatu pertimbangan. Nilai bobot ini berkisar antara 0 - 1. dan total bobot untuk setiap kolom adalah 1.

Setelah menentukan nilai bobot untuk kriteria masing-masing alternatif pada kolom matriks *pairwise comparison*, dapat dilakukan perhitungannya untuk menentukan pilihan alternatif yang diinginkan. Cara perhitungannya dilakukan dengan :

- a) Menjumlahkan nilai dalam setiap kolom *pairwise comparison matrix*.
- b) Membagi setiap elemen dalam *pairwise comparison matrix* dengan nilai kolom tersebut, yang kemudian menjadi *normalized pairwise comparison matrix*.
- c) Menghitung rata - rata untuk setiap elemen *normalized matrix*. Rata - rata ini menunjukkan tingkat kepentingan untuk setiap alternatif.

Semakin banyak alternatif yang dipilih serta kriteria pilihan tersebut, semakin banyak *pairwise comparison matrix* yang perlu dibuat.

Contoh bobot dari **(KPI A, KPI A)** = $1 / (1+2+5+3) = 0.090$, **(KPI B, KPI A)** = $2 / (1+2+5+3) = 0.181$. Dengan perhitungan yang sama bobot prioritas tabel KPI di atas menjadi:

Tabel 3.3 : Pembobotan KPI

	KPI A	KPI B	KPI C	KPI D
KPI A	0.091	0.091	0.057	0.118
KPI B	0.182	0.182	0.094	0.353
KPI C	0.455	0.545	0.283	0.176
KPI D	0.273	0.182	0.566	0.353

Selanjutnya adalah mencari nilai bobot untuk masing-masing KPI.

Caranya adalah dengan melakukan penjumlahan setiap nilai bobot prioritas pada setiap baris tabel dibagi dengan jumlah KPI. Sehingga diperoleh bobot masing-masing KPI adalah:

- KPI A = $(0.091 + 0.092 + 0.057 + 0.11) / 4 = 0.089$ (8.9%)
- KPI B = $(0.182 + 0.182 + 0.094 + 0.353) / 4 = 0.203$ (20.3%), dengan perhitungan yang sama KPI C, KPI D
- KPI C = 0.365 (36.5%)
- KPI D = 0.343 (34.3%)

Sehingga jumlah total bobot semua KPI = 1 (100%) sesuai dengan kaidah pembobotan dimana jumlah total bobot harus bernilai 100.

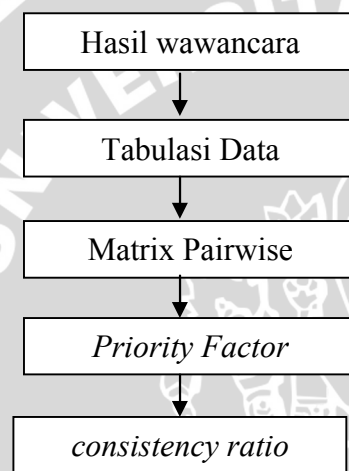
Bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel menunjukkan faktor atau variabel tersebut lebih penting dibandingkan

dengan faktor atau variabel lainnya dalam menentukan daya tarik investasi suatu daerah menurut persepsi pelaku usaha.

Perhitungan secara manual akan lebih mudah jika jumlah KPI yang dimiliki hanya sedikit, jika jumlah KPI sudah lebih dari 10 maka perhitungan bobot menggunakan software akan jauh lebih mudah.

Tahapan dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Tahapan Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Hotel di Kota Batu

Seiring dengan makin meningkatnya bidang pariwisata di kota Batu, maka industri atau usaha di bidang perhotelanpun semakin meningkat guna menidukung kegiatan pariwisata. Sampai dengan akhir tahun 2008, jumlah hotel di Kota Batu mencapai 54 buah baik hotel bintang ataupun hotel melati. Setiap hotel mempunyai jenis dan jumlah kamar yang berbeda. Jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel berbeda untuk setiap jenisnya. Disamping mempunyai jenis kamar kamar standar, hotel juga menyediakan jenis kamar lain yang menyediakan fasilitas lebih baik. Untuk operasionalisasinya, jenis kamar standar mempunyai jumlah lebih banyak daripada jenis kamar yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jenis kamar standar sangat mendominasi jumlah kamar secara keseluruhan. Rata-rata hotel mempunyai jenis kamar standar lebih dari 50 % dari jumlah kamar yang dimiliki.

Penentuan jenis kamar tersebut berdasarkan pada pemberian fasilitas hotel. Semakin lengkap fasilitas yang diberikan, harga yang ditawarkan semakin mahal. Setiap hotel memberikan fasilitas yang berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Beberapa hotel melengkapi produk utamanya dengan menawarkan fasilitas kolam renang, gym, sauna, karaoke dan sebagainya. Harga kamar hotel rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya, besarnya kenaikan harga kamar tersebut berkisar antara 6 % sampai 30 %. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan dalam biaya operasional perusahaan termasuk biaya bahan baku dan biaya-biaya lainnya.

Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan di Kota Batu baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing, tingkat hunian usaha

perhotelanpun mengalami peningkatan. Perkembangan usa perhotelan ini terkadi seiring dengan makin maraknya kegiatan pariwisata di kota tersebut. Pada tahun 2006 rata-rata tingkat hunian sebesar 44,46%, tahun 2007 meningkat menjadi 53,32% dan pada tahun 2008 menjadi 59,22%.

4.2 Deskripsi Subyek Penelitian

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa responden atau sampel dalam penelitian ini adalah para pengusaha di bidang perhotelan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Secara umum “hotel” adalah bangunan yang terdiri dari beberapa kamar yang disewakan untuk tamu menginap dengan membayar sejumlah uang. Hotel adalah perusahaan yang dikelola secara komersial yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta fasilitas-fasilitas yang lainnya yang memenuhi syarat kenyamanan. (Keputusan menteri perhubungan republik Indonesia no: PM 10/PW-301/Phb 77, 1977). Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagin umum yang dikelola secara komersil. (Surat keputusan direktur jenderal pariwisata no.14/U/11/88).

Dengan demikian maka definisi hotel adalah suatu bentuk usaha atau perusahaan yang dikelola secara komersial dengan menyediakan fasilitas penginapan, makan atau minum dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi konsumen.

Tabel 4.1 : Daftar Responden Penelitian Klasifikasi Hotel Bintang tiga dan Bintang Lima di Kota Batu

No	Nama Hotel	Alamat
1	H. Agro Bukit Cemara Emas	Jl. Flamboyan No 03 - Songgokerto Batu
2	H. Agro Wisata Punten Mandiri	Jl. Raya Punten - Punten Bumiaji
3	H. Arumdalu	Jl. Songgoriti No.04 - Songgokerto Batu
4	H. Asida	Jl. P. Sudirman 99 - Pesanggrahan Batu
5	H. Aster	Jl. Trunojoyo 07 - Songgokerto Batu
6	H. Batu Inn	Jl. Trunojoyo No.66 Songgokerto -Batu
7	H. Batu Permai	Jl. Melati no. 1 Pesanggrahan - Batu
8	H. Garuda	Jl. Rusman No 07 Songgokerto Batu
9	H. Grand Palem	Jl. Trunojoyo 32 Songgokerto Batu
10	H. Kartika Raya	Jl. Ry. Songgoriti Atas Songgokerto Batu
11	H. Kartika Wijaya	Jl. P. Sudirman 127 Pesanggrahan Batu
12	H. Kusuma Agro Wisata	Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Batu
13	H. Metropole	Jl. P. Sudirman 93 Pesanggrahan Batu
14	H. Monalisa	Jl. Ry Selecta 144 Tulungrejo - Bumiaji
15	H. Mustika sari	Jl. Budiono No. 02 Songgokerto Batu
16	H. Nirwana	Jl. Arumdalu 5 Songgokerto - Batu
17	H. Purnama	Jl. Raya Selecta 1-15 Punten Bumiaji
18	H. Putri Bulan	Jl. Bukit bunga No. 01 Sidomulyo Batu
19	H. Royal Orchid	Jl. Indragiri No. 4 Pesanggrahan Batu
20	H. Santoso	Jl. Raya Selecta Batu
21	H. Selecta	Jl. Raya Selecta
22	H. Songgoriti	Jl. Songgoriti Atas Songgokerto Batu
23	H. Tawang Argo	Jl. Brantas 116 Batu Pesanggrahan Batu
24	H. Trisno Putro	Jl. Trunojoyo No. 80 Songgokerto Batu
25	H. Victory	Jl. Raya Junggo 107 Batu
26	H. Wijaya	Jl. Raya Selecta Punten Bumiaji
27	H. Wisma Indah	Jl. Trunojoyo No. 34 Songgokerto Batu

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu, 2008

Profil responden yang disurvei adalah sebagai berikut. Dari target 27 responden pengusaha perhotelan di Kota Batu, semua pengusaha berhasil diwawancarai. Pendidikan terakhir responden penelitian sebesar 54% responden

merupakan lulusan S2, 21% lulusan S1, 10% lulusan diploma dan 15% lulusan SMA.

4.3 Pengolahan Data dan Analisis Data

4.3.1 Prinsip Penggunaan AHP dalam Analisis Data

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan satu metoda dalam pemilihan alternatif-alternatif dengan melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana yang digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan berdasarkan ranking. Metoda yang digunakan berdasarkan proses AHP, disusun sesuai dengan sifat-sifat rasional untuk menyeleksi yang terbaik dari sejumlah alternatif dan dievaluasi dengan memperhatikan beberapa kriteria.

Di dalam metoda ini pembuat keputusan harus membuat sebuah struktur masalah keputusan sebuah hierarki yang terdiri dari tiga tingkat dimana tujuan keputusan pada tingkat paling atas, diikuti kriteria pada tingkat kedua dan pemilihan alternatif-alternatif pada tingkat ketiga.

Langkah-langkah utama yang harus diambil dalam menggunakan AHP yaitu:

- 1) Menentukan fokus, kriteria atau sub kriteria dan alternatif
- 2) Memberikan bobot pada kriteria
- 3) Membandingkan, memberi nilai untuk alternatif menurut tiap kriteria
- 4) Sintesis; nilai akhir

AHP didesain berdasarkan hal yang bersifat intuitif dan rasional untuk menyeleksi yang terbaik dari sejumlah alternatif yang dievaluasi dengan memerhatikan beberapa kriteria. Dalam proses ini, pembuat keputusan (*stakeholders*) melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan untuk penyusunan alternatif-alternatif pada urutan ranking/prioritas.

Di dalam metode ini, pembuat keputusan harus membuat sebuah struktur masalah keputusan. Bentuk paling sederhana yang digunakan untuk membuat keputusan dengan hierarki terdiri dari tiga tingkat:

- 1) Tingkat pertama : tujuan keputusan (*goal*)
- 2) Tingkat kedua : kriteria-kriteria
- 3) Tingkat ketiga : alternatif pilihan

Tujuan struktur ini adalah untuk memungkinkan penilaian arti penting variable pada tingkatan yang ada.

4.3.2 Pembobotan Faktor, Variabel, dan Indikator

Dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), survei ini dapat menghitung bobot faktor dan melakukan pemeringkatan terhadap bobot faktor dan variabel penentu investasi daerah.

Pada dasarnya langkah-langkah pada metode AHP meliputi:

- 1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
- 2) Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah
- 3) Memuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
- 4) Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh pilihan seluruhnya
- 5) Menghitung nilai eigenvector dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi

- 6) Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki
- 7) Menghitung eigenvector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigenvector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan
- 8) Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10 persen maka penilaian data pilihan harus diperbaiki.

Skala perbandingan berpasangan didasarkan pada nilai-nilai fundamental AHP dengan pembobotan dari nilai 1 untuk tidak penting sampai 5 untuk sangat penting. Dari susunan matriks perbandingan berpasangan dihasilkan sejumlah prioritas, yang merupakan pengaruh relatif sejumlah elemen di dalam tingkat yang ada di atasnya. Perhitungan eigen vektor dengan mengalikan elemen-elemen pada setiap baris dan perhatikan akar ke- n , dimana n adalah jumlah elemen. Kemudian lakukan normalisasi untuk menyatukan jumlah kolom yang diperoleh, dengan membagi setiap nilai dengan total nilai. Pembuat keputusan bisa menentukan tidak hanya urutan ranking prioritas setiap tahap perhitungannya, tetapi juga besaran prioritasnya.

Sebelum melakukan pembobotan faktor, variabel dan indikator, maka disajikan daftar faktor, variabel dan indikator untuk pemeringkatan daya tarik investasi di Kota Batu, seperti tabel berikut.

Tabel 4.2: Daftar Faktor - Variabel - Indikator Untuk Pemeringkatan

No	Faktor, Variabel, Indikator	Keterangan
A. FAKTOR KELEMBAGAAN		
1. Variabel Kepastian Hukum		
1	Konsistensi peraturan yang mengatur kegiatan usaha	Mengukur kepastian, kejelasan, & konsistensi pemberlakuan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mengatur kehidupan berusaha
2	Penegakan hukum	Mengukur kepastian hukum seperti perlindungan pelaksanaan kontrak kerja & hak atas kepemilikan, konsistensi keputusan peradilan, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha
3	Pungli di luar birokrasi	Melihat penanganan yg dilakukan oleh Pemda thd. bbg praktik-praktik pungutan illegal yg dilakukan oleh orang, kelompok orang/ masy di luar birokrasi, yang mengganggu kegiatan usaha.
4	Hubungan Eksekutif – Legislatif	Melihat dampak dari kondisi hubungan antara DPRD- Pemda Thd. Pelayanan publik dan kepastian berusaha.
2. Variabel Aparatur dan Pelayanan		
5	Birokrasi pelayanan terhadap dunia usaha	Mengukur kemudahan pelayanan birokrasi dan profesionalisme aparat pemda dalam melakukan Pelayanan Thd. dunia usaha.
6	Penyalahgunaan wewenang	Mengukur distorsi perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan thd. dunia usaha.
3. Variabel Keuangan Daerah		
7	Struktur pungutan oleh Pemda terhadap dunia usaha.	Melihat struktur berbagai pungutan yang berlaku di daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah.

Lanjutan Tabel 4.2

No	Faktor, Variabel, Indikator	Keterangan
8	Komitmen Pemda dalam penyediaan sarana pendukung kegiatan usaha.	Mengukur komitmen Pemda dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, yang tercermin dari pengalokasian dana untuk anggaran pembangunan
4. Variabel Perda		
9	Peraturan produk hukum daerah (Pajak dan Retribusi)	Mengukur kualitas kebijakan / produk hukum yang dibuat oleh Pemda (Perda, SK Bupati/Wali Kota dsb) khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha.
B. FAKTOR KONDISI SOSPOL		
1. Variabel Keamanan		
10	Gangguan keamanan terhadap aktivitas dunia usaha	Mengukur hambatan kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan Thd. aktivitas usaha
11	Gangguan keamanan terhadap masy lingkungan sekitar tempat kegiatan usaha	Mengukur hambatan keamanan dan rasa aman masy di lingkungan kegiatan usaha
12	Kecepatan aparat menanggulangi gangguan keamanan	Mengukur kualitas aparat keamanan dalam menangani gangguan keamanan / ketertiban umum, serta jaminan dan perlindungan keamanan yang dapat diberikan oleh aparat keamanan di daerah
2. Variabel Sospol		
13	Partisipasi masy/dunia usaha dalam perumusan kebijakan Pemda	Mengukur keterbukaan birokrasi thd. partisipasi masy / dunia usaha dalam perumusan kebijakan yg menyangkut kepentingannya (dunia usaha). Mengukur keterbukaan / peluang masy untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan
14	Potensi konflik di masyarakat	Mengukur potensi hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik sosial di lingkungan usaha

Lanjutan Tabel 4.2

No	Faktor, Variabel, Indikator	Keterangan
15	Stabilitas politik	Mengukur hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik politik yang ada di daerah.
16	Intensitas unjuk rasa	Mengukur intensitas kegiatan unjuk rasa yg dapat menghambat / mengganggu kelancaran kegiatan usaha.
3. Variabel Budaya Masyarakat		
17	Keterbukaan masy terhadap dunia usaha	Mengukur daya dukung masy thd. kegiatan usaha dilihat dari penerimaan masy thd. keberadaan kegiatan usaha, masuknya investasi dari luar daerah dan para pendatang yang melakukan kegiatan usaha / bekerja di daerahnya
18	Perilaku masy yg non diskriminatif.	Mengukur daya dukung masy sekitar tempat usaha dilihat dari perlakuannya thd. orang lain dari luar secara sama tanpa melihat perbedaan yang ada (suku, agama, ras, gender dsb)
19	Adat istiadat masyarakat daerah	Melihat daya dukung nilai-nilai dan adat- istiadat yang berkembang di masy yang mendukung produktivitas.
20	Etos kerja masyarakat daerah	Mengukur daya dukung penduduk, masy, pelaku usaha, dan pekerja di daerah yg menunjukkan etos kerja dan semangat kerja keras dan dapat bersaing secara sehat

Lanjutan Tabel 4.2

No	Faktor, Variabel, Indikator	Keterangan
C. FAKTOR EKONOMI DAERAH		
1. Variabel Potensi Ekonomi		
21	Daya beli masyarakat	Mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari penghasilan rata-rata masyarakat.
22	Pertumbuhan ekonomi daerah	Melihat potensi ekonomi daerah dari proyeksi perkembangan / pertumbuhan perekonomian di daerah.
23	Kesejahteraan dan produktivitas masyarakat	Mengukur kesejahteraan dan produktivitas, kualitas hidup penduduk di daerah.
2. Variabel Struktur Ekonomi		
24	Nilai tambah sektor primer	Untuk melihat struktur perekonomian daerah dan yang berbasis pada SDA.
25	Nilai tambah sektor sekunder	Mengukur struktur perekonomian daerah yang sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif, dan industrialisasi
26	Nilai tambah sektor tersier	Mengukur Kemampuan Jasa Lembaga Keuangan dalam perekonomian daerah.
FAKTOR		
D. KETENAGAKERJAAN		
1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja		
27	Ketersediaan tenaga kerja usia produktif	Mengukur besarnya penduduk usia produktif yang dibutuhkan sebagai naker pada kegiatan usaha.
28	Ketersediaan naker berpengalaman berpendidikan minimal SLTP	Mengukur ketersediaan naker yg sudah berpengalaman sebagai naker pada sektor kegiatan usaha secara formal.
29	Ketersediaan tenaga kerja pencari kerja	Mengukur ketersediaan pencari kerja untuk mengisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Lanjutan Tabel 4.2

No	Faktor, Variabel, Indikator	Keterangan
2. Variabel Biaya Tenaga Kerja		
30	Biaya tenaga kerja berdasarkan aturan formal	Mengukur tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan berdasarkan aturan formal sebagai biaya yg dikeluarkan oleh pengusaha.
31	Biaya tenaga kerja aktual	Mengukur biaya naker berdasarkan sektor-sektor usaha yang sesungguhnya akan dikeluarkan oleh pengusaha.
3. Variabel Produktivitas Tenaga Kerja		
32	Produktivitas tenaga kerja	Mengukur Produktivitas pekerja sektor manufaktur.
E. FAKTOR INFRASTRUKTUR		
1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur		
33	Ketersediaan jalan	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur untuk Transportasi Darat
34	Ketersediaan sambungan telepon	Mengukur Ketersediaan Sarana Komunikasi.
35	Ketersediaan saluran (sambungan) listrik	Mengukur Ketersediaan Listrik Sebagai sumber Energi untuk Aktivitas Usaha.
E. FAKTOR INFRASTRUKTUR		
Variabel Kualitas		
2. Infrastruktur		
36	Kualitas jalan	Mengukur kualitas infrastruktur fisik yang tersedia di daerah, sebagai penunjang kegiatan usaha.
37	Kualitas saluran (sambungan) telepon	Mengukur kualitas kelancaran sarana komunikasi di daerah
38	Kualitas suplai listrik	Mengukur kualitas sumber energi sarana pendukung kegiatan usaha.

Sumber : KPPOD, 2005

Bobot Faktor, Variabel, dan Indikator Pemingkatan diperoleh dengan menggunakan metode AHP (*The Analytic Hierarchy Process*) dengan bantuan perangkat lunak 'Expert Choice'. Prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan daya tarik investasi.

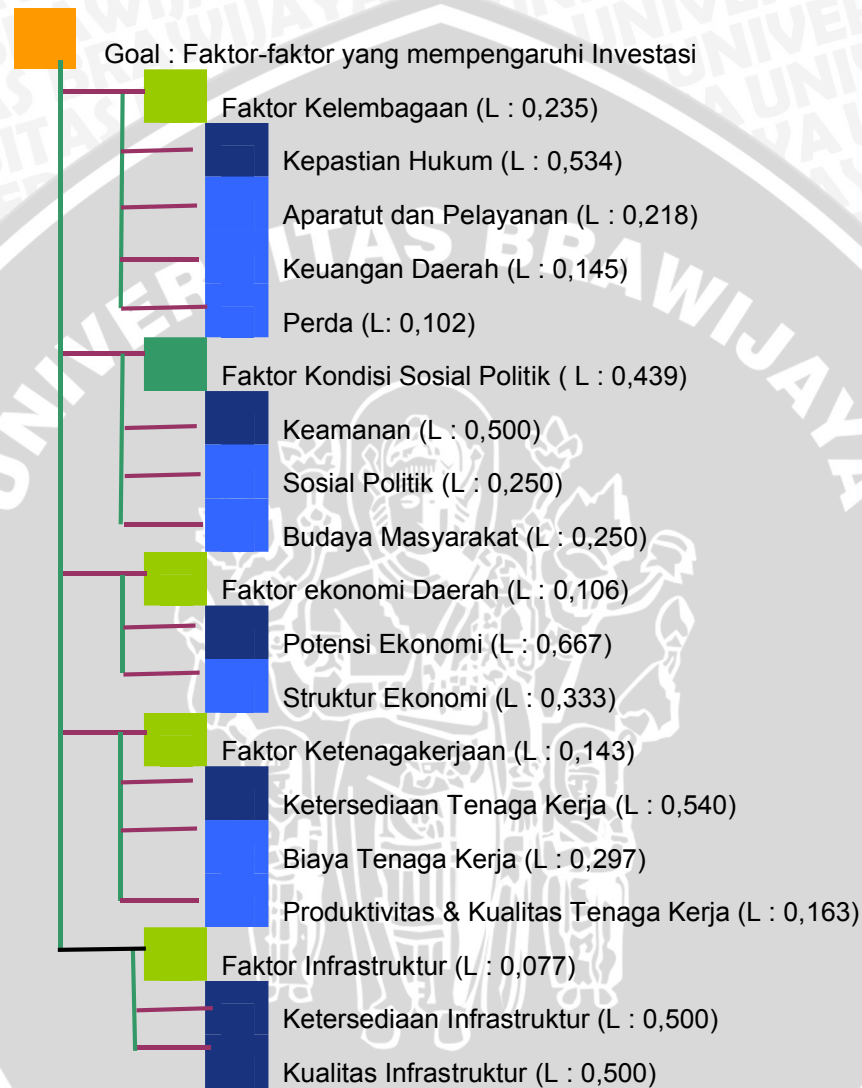
4.3.3 Proses penentuan Prioritas Daya Tarik Investasi

Dalam menentukan prioritas penentu daya tarik investasi di Kota Batu digunakan metoda analisa AHP (*analytical hierarchy process*), dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan nilai dari setiap faktor dan setiap variabel
- 2) Menentukan hirarki dari setiap faktor dan setiap variabel. Penentuan ini berdasarkan persepsi masing-masing responden seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
- 3) Menentukan prioritas:
 - Menentukan prioritas dari faktor investasi yang terdiri dari 5 faktor dalam mencapai tujuan.
 - Menentukan prioritas dari variabel-variabel yang mendukung faktor investasi.
 - Membandingkan faktor dan variabel di atas dalam bentuk matriks yang berpasangan dan selanjutnya menentukan vektor prioritas untuk masing-masing faktor dan variabel tersebut.
 - Menentukan ranking dari masing-masing prioritas tersebut.
 - Faktor dan variabel yang memiliki nilai ranking lebih besar atau tinggi ditetapkan sebagai daya tarik investasi yang paling prioritas

Hasil Pembobotan Faktor, Variabel dan Indikator, secara lengkap dapat dilihat pada Diagram Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemingkatan berikut :

Gambar 4.1 : Bobot Faktor; Variabel; Indikator Pemingkatan



Sumber : Analisis Data Primer dengan perangkat *Expert Choice*, 2009

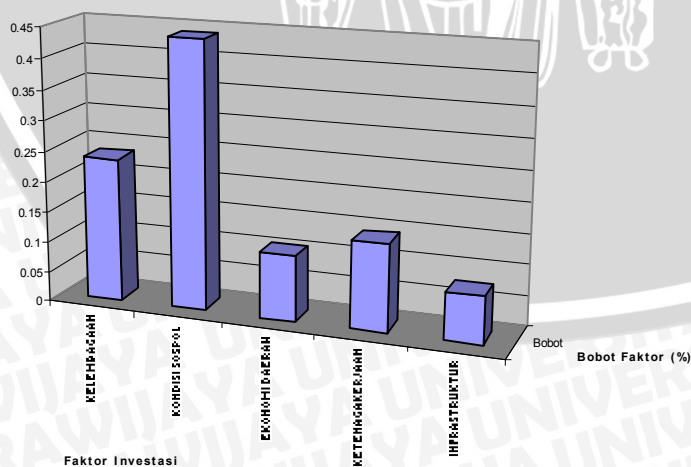
Dari gambar 4.1 terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di kota Batu dibedakan menjadi faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari faktor Ekonomi Daerah dan faktor Tenaga Kerja, sedangkan faktor non-ekonomi meliputi faktor Kelembagaan, Sosial Politik dan Infrastruktur.

Hasil analisis matrik berpasangan menunjukkan bahwa dari kelima faktor daya tarik investasi kondisi sosial ekonomi mendapatkan bobot lebih besar dibandingkan keempat faktor yang lain. Kondisi sosial politik tersebut didukung oleh faktor keamanan, sosial politik dan budaya masyarakat, dimana dari hasil perbandingan berpasangan diperoleh bahwa keamanan mempunyai bobot lebih tinggi, sedangkan sosial politik dan budaya masyarakat mempunyai bobot yang sama besar yaitu setengah bobot nilai keamanan. Faktor daya tarik kedua adalah faktor kelembagaan yang didukung oleh variabel kepastian hukum, aparat dan pelayanan, keuangan daerah dan peraturan daerah. Dan diantara variabel yang mendukung faktor kelembagaan, variable Kepastian Hukum mempunyai bobot nilai tertinggi diikuti oleh variable Aparatur dan Pelayanan, Keuangan Daerah dan bobot nilai paling kecil variable peraturan darah.

4.3.4 Peringkat Faktor Daya Tarik Investasi

Peringkat faktor dan variabel investasi di Kota Batu diberikan dalam gambar berikut. Gambar 4.2 memperlihatkan statistik peringkat faktor investasi di Kota Batu berdasarkan Kriteria Umum (Nilai Total).

Gambar 4.2 : Peringkat Faktor investasi Berdasarkan Kategori Umum (Nilai Total)



Dari gambar di atas terlihat bahwa faktor Kondisi Sosial politik memperoleh peringkat tertinggi, diikuti oleh faktor kelembagaan dan peringkat terendah adalah faktor infrastruktur. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Kondisi Sosial Politik mendapat peringkat tertinggi daya tarik investasi dan memiliki bobot paling besar atau yakni sebesar 43,90%, faktor Kelembagaan sebesar 23,50% kemudian diikuti oleh faktor Tenaga Kerja sebesar 14,30% dan faktor Ekonomi Daerah menempati urutan keempat yakni sebesar 10,60%. Terakhir adalah faktor infrastruktur fisik sebesar 7,70%. Jadi menurut para pelaku usaha perhotelan di Kota Batu, faktor penentu investasi Kota Batu terutama dipengaruhi oleh faktor yang memiliki bobot terbesar yaitu Sosial Politik (Gambar 4.1).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi dalam pengertian konseptual merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat multi dimensional. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam dunia nyata bahwa seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah.

Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, prediksi tingkat keuntungan, prediksi mengenai kondisi ekonomi ke depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan keuntungan perusahaan (Sukirno, 2004).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menempati peringkat tertinggi sebagai daya penentu atau daya tarik investasi menurut pelaku usaha di Kota Batu adalah faktor kondisi sosial politik dengan bobot faktor sebesar 0,439 atau sebesar 43,90% dari total bobot. Peringkat tertinggi yang diperoleh faktor kondisi sosial politik di atas didukung oleh variable keamanan sebagai variable utama yaitu sebesar 0,50% dan kedua variable lainnya yakni sosial politik dan budaya masyarakat masing-masing sebesar 25% dari bobot total faktor. Berdasarkan hasil penelitian ini berarti bahwa kondisi sosial politik suatu daerah merupakan daya tarik utama untuk investasi di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat, dan kondisi politik yang kondusif

Hasil penelitian ini seolah mengabaikan faktor ekonomi dalam hal ini ekonomi daerah yang merupakan salah satu faktor yang berhubungan langsung dengan keberhasilan investasi. Sebagaimana umumnya terjadi bahwa faktor pertama yang diperhitungkan dan dituju dalam berinvestasi adalah factor ekonomi dalam hal ini usaha investor untuk mendapatkan *return* (laba/keuntungan) yang setingginya namun menurunkan *cost* (biaya). Namun dalam investasi khususnya di Kota Batu, para investor telah memiliki suatu keyakinan bahwa investasi dalam bidang yang menunjang kepariwisataan akan memberikan hasil yang memuaskan dalam arti perolehan laba yang tinggi, karena kota atau daerah bersangkutan penuh dengan berbagai potensi utamanya di bidang wisata yang dapat dikelola atau dimanfaatkan untuk berinvestasi. Selain itu sejak Kota Batu berdiri sebagai Kota Madya bukan lagi Kota Administratif yang berada di bawah Kabupaten Malang, pemerintah kota bersikap sangat strategis dalam membangun daerahnya dan memnfaatkan potensi daerahnya. Kemampuan pemerintah tersebut didukung oleh keberadaan

masyarakat Kota Batu yang dikenal sangat produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta keinginan yang besar untuk maju.

Karena hal ini maka kondisi ekonomi daerah menjadi factor yang kurang diperhitungkan oleh investor dalam penelitian ini, melainkan faktor sosial politik. Kondisi ini besar kemungkinannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, yang diyakini akan sangat menentukan keberhasilan suatu investasi. Meskipun factor ekonomi sangat mendukung bagi keberhasilan investasi namun apabila kondisi social politik seperti keamanan kurang terjamin maka suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

Faktor sosial politik sebagaimana dinilai oleh para pelaku usaha menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama untuk kondisi keamanan dan konflik sosial. Ketika akan berinvestasi ke suatu daerah yang secara ekonomi dinilai menguntungkan maka terdahulu para investor akan mempertanyakan keadaan keamanan daerah tersebut. Karena meskipun menguntungkan dari segi ekonomi namun bila kondisi keamanan tidak terjamin, maka usaha atau investasi yang dilakukan akan gagal karena banyaknya gangguan keamanan.

Para pelaku usaha di Kota Batu menilai indikator-indikator yang tergabung dalam faktor sosial politik sangat baik. Berdasarkan penilaian para pelaku usaha di Kota Batu, di kota tersebut hampir tidak pernah terjadi gangguan keamanan usaha, aparat keamanan sangat cepat dalam menanggulangi gangguan keamanan, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun yang terjadi di masyarakat, hal inilah yang menurut para pelaku usaha menjadi salah satu faktor mengapa selama ini tidak dijumpai adanya gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha. Kondisi lingkungan usaha yang menjamin keamanan dan kepastian bagi pelaku usaha dan investor merupakan syarat utama kondisi lingkungan usaha yang kondusif.

Selain variabel keamanan dengan indikator-indikator pendukung pilihan prioritas terhadap faktor sosial politik sebagaimana telah disebutkan di atas, variabel lain yang turut menentukan pilihan prioritas pelaku usaha khususnya usaha perhotelan adalah variabel sosial politik dengan indikator-indikatornya keterbukaan birokrasi (pemerintah) kepada pelaku usaha untuk turut ambil bagian dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan dunia usaha. Pelaku usaha menilai bahwa Pemkot Batu senantiasa mengkomunikasikan setiap rencana kebijakan kepada masyarakat dan menjalin kerja sama secara harmonis dengan DPRD. Di samping itu, stabilitas politik dan rendahnya konflik merupakan hal yang tak dapat diabaikan oleh dunia usaha dan akan sangat menentukan masuknya investor ke kota Batu.

Dan variabel terakhir sebagai penentu pilihan pelaku usaha terhadap faktor kondisi sosial politik adalah variabel budaya masyarakat. Suatu usaha yang dijalankan akan sangat memerlukan dukungan masyarakat untuk dapat berkembang dengan baik, usaha yang dijalankan memerlukan lingkungan masyarakat yang tidak diskriminatif, masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi yaitu semangat juang yang tinggi untuk maju dan persaingan yang sehat untuk mencapai kemajuan. Masyarakat Kota Batu sangat demokratis dan tidak diskriminatif, tidak membedakan pengusaha baik dari segi agama, ras, etnis/kebangsaan. Masyarakat mampu beradaptasi dengan berbagai pendatang dan berperilaku sopan dan ramah pada siapa saja. Hal ini membuat pelaku usaha merasa diterima oleh masyarakat dan menimbulkan optimisme bahwa usaha yang dikembangkan akan berhasil.

Masyarakat Kota Batu dinilai memiliki etos kerja yang baik serta ditunjang dengan kondisi politik lokal yang stabil, juga merupakan faktor penting. Etos kerja masyarakat yang tinggi dan sikap terbuka kepada investor dari luar, merupakan cermin kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi.

Peringkat tertinggi faktor kondisi sosial politik sebagai daya tarik investasi di Kota Batu ini tidak terlepas dari dukungan dan kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim politik yang kondusif, keamanan yang mantap, kecepatan aparat keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan menyebabkan iklim investasi di daerah ini sangat kondusif sehingga para pelaku usaha khususnya di bidang perhotelan merasa lebih bergairah untuk meningkatkan kinerja usahanya. Kecepatan aparat dalam merespon dan menanggulangi gangguan keamanan, membuat daerah ini sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi. Sementara kultur agraris dengan sikap terbuka bagi kehadiran dunia usaha dari luar, adalah keseharian yang ada di Kota Batu. Dinamika politik yang terjadi di daerah tidak mengganggu kegiatan usaha di sana.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ida Susanti (2008: 25) bahwa untuk menarik penanaman modal di daerah, ada beberapa kendala yang harus diperhatikan dan sekaligus menjadi tantangan, yaitu :

- 1) Bagaimana daerah mampu membangun dan menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan investor merasa aman untuk menanamkan investasinya di daerah.
- 2) Mutu dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah terutama yang berkenaan dengan pengurusan izin, yang tidak bertele-tele dan tidak terlampaui birokratis.
- 3) Kemampuan daerah untuk membangun pemerintahan yang bersih (*good governance*), terbuka dan transparan.
- 4) Kemampuan daerah untuk membangun jaringan infrastruktur yang akan memudahkan lalulintas orang, barang dan jasa
- 5) Kemampuan daerah untuk memberikan jaminan kepastian (hukum) berusaha bagi investor.

Dinyatakan pula oleh Rosyidah (2003 : 119), Dalam rangka menarik investor ke daerah, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan hal-hal berikut :

- 1) Menggali dan mengidentifikasi untuk menentukan potensi keunggulan daerah yang bisa ditawarkan kepada investor
- 2) Menetapkan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang mendukung penciptaan iklim kondusif bagi investor
- 3) Melakukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dan pengaturan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan penanaman modal baik internasional maupun nasional
- 4) Mempersiapkan peningkatan sumberdaya manusia, aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik dengan investor
- 5) Mendukung partisipasi aktif masyarakat atau publik pada aktifitas dan pengawasan kegiatan penanaman modal
- 6) Perbaikan/peningkatan sarana & prasarana pendukung
- 7) Perbaikan pelayanan perijinan bagi penanaman modal secara sederhana, cepat, mudah, murah dan memuaskan
- 8) Mengupayakan keamanan, kenyamanan, ketertiban lingkungan agar tercipta iklim murah dan memuaskan
- 9) Mendukung pemberian fasilitas untuk peningkatan sumberdaya masyarakat agar dapat menduduki jabatan strategis dan terjadi alih teknologi

4.4 Persepsi Dunia Usaha

Untuk mengetahui bagaimana persepsi dunia usaha mengenai iklim investasi di kota Batu akan dilihat dari hasil penyebaran angket kepada responden, yang dalam hal ini adalah responden pelaku usaha perhotelan. Hasil penyebaran angket tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3: Persepsi Dunia Usaha

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
1	Apakah pemberlakuan Perda & kebijakan lainnya yg mengatur kehidupan berusaha sudah konsisten?		
	a. Sangat konsisten	2	7,41
	b. konsisten	15	55,56
	c. Cukup konsisten	10	37,04
	d. Tidak konsisten	-	-
	e. Sangat tidak konsisten	-	-
2	Apakah proses penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan dunia usaha sudah konsisten?		
	a. Sangat konsisten	1	3,70
	b. konsisten	3	11,11
	c. Cukup konsisten	15	55,56
	d. Tidak konsisten	7	25,93
	e. Sangat tidak konsisten	1	3,70
3	Apakah biaya-biaya tidak resmi di luar birokrasi (oleh preman)		
	a. Sangat meresahkan	6	22,22
	b. Meresahkan	-	-
	c. Cukup meresahkan	11	40,74
	d. Kurang meresahkan	6	22,22
	e. Tidak meresahkan	4	14,81
4	Bagaimanakah dampak hubungan antara DPRD dg Pemda terhadap dunia usaha?		
	a. Sangat baik	2	7,41
	b. Baik	7	25,93
	c. Cukup baik	18	66,67
	d. Kurang baik	-	-
	e. Tidak baik	-	-

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
5	Bagaimanakah tingkat pelayanan oleh aparat pemerintah terhadap dunia usaha?		
	a. Sangat baik	1	3,70
	b. Baik	19	70,37
	c. Cukup baik	7	25,93
	d. Kurang baik	-	-
	e. Tidak baik	-	-
6	Bagaimanakah rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan terkait dg dunia usaha?		
	a. Sangat jelas	5	18,52
	b. Jelas	3	11,11
	c. Kurang jelas	17	62,96
	d. Kurang jelas	2	7,41
	e. Tidak jelas	-	-
7	Bagaimanakah Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan kegiatan dunia usaha?		
	a. Sangat Mendukung	2	7,41
	b. Mendukung	23	85,19
	c. Kurang Mendukung	1	3,70
	d. Kurang Mendukung	-	-
	e. Tidak Mendukung	1	3,70
8	Bagaimana struktur pungutan yang dilakukan oleh Pemda?		
	a. Sangat jelas	5	18,52
	b. Jelas	4	14,81
	c. Kurang jelas	7	25,93
	d. Kurang jelas	4	14,81
	e. Tidak jelas	7	25,93
9	Bagaimanakah konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan daerah?		
	a. Sangat konsisten	4	14,81
	b. konsisten	4	14,81
	c. Cukup konsisten	4	14,81
	d. Tidak konsisten	11	40,74
	e. Sangat tidak konsisten	4	14,81
10	Bagaimanakah tingkat keamanan terhadap dunia usaha		
	a. Sangat Aman	6	22,22
	b. Aman	1	3,70
	c. Cukup Aman	11	40,74
	d. Tidak Aman	6	22,22
	e. Sangat tidak Aman	3	11,11

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
11	Menurut saudara, konflik sosial dalam masyarakat		
	a. Sangat Mengganggu	-	-
	b. Mengganggu	-	-
	c. Cukup Mengganggu	7	25.93
	d. Kurang Mengganggu	19	70.37
	e. Tidak Mengganggu	1	3.70
12	Bagaimanakah kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan		
	a. Sangat Tanggap	3	11.11
	b. Tanggap	6	22.22
	c. Cukup Tanggap	14	51.85
	d. Kurang Tanggap	2	7.41
	e. Tidak Tanggap	2	7.41
13	Bagaimanakah keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha?		
	a. Sangat baik	4	14.81
	b. Baik	16	59.26
	c. Cukup baik	4	14.81
	d. Kurang baik	3	11.11
	e. Tidak baik		
14	Menurut saudara, konflik politik		
	a. Sangat Mengganggu	4	14.81
	b. Mengganggu	8	29.63
	c. Cukup Mengganggu	13	48.15
	d. Kurang Mengganggu	2	7.41
	e. Tidak Mengganggu	-	-
15	Menurut saudara, bagaimanakah stabilitas politik di daerah ini?		
	a. Sangat baik	3	11.11
	b. Baik	6	22.22
	c. Cukup baik	12	44.44
	d. Kurang baik	5	18.52
	e. Tidak baik	1	3.70
16	Bagaimanakah kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat?		
	a. Sangat tinggi	5	18.52
	b. tinggi	2	7.41
	c. Cukup tinggi	14	51.85
	d. Rendah	5	18.52
	e. Sangat Rendah	1	3.70

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
17	Bagaimanakah keterbukaan masyarakat terhadap masuknya dunia usaha?		
	a. Sangat Terbuka	3	11.11
	b. Terbuka	5	18.52
	c. Cukup Terbuka	19	70.37
	d. Kurang Terbuka	-	-
	e. Tidak Terbuka	-	-
18	Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap suatu investasi usaha?		
	a. Sangat Mendukung	-	-
	b. Mendukung	1	3.70
	c. Kurang Mendukung	7	25.93
	d. Kurang Mendukung	1	3.70
	e. Tidak Mendukung	18	66.67
19	Bagaimanakah etos kerja masyarakat?		
	a. Sangat baik	-	-
	b. Baik	-	-
	c. Cukup baik	20	74.07
	d. Kurang baik	7	25.93
	e. Tidak baik	-	-
20	Bagaimanakah pengaruh adat istiadat terhadap produktivitas usaha?		
	a. Sangat Mendukung	-	-
	b. Mendukung	7	25.93
	c. Kurang Mendukung	16	59.26
	d. Kurang Mendukung	4	14.81
	e. Tidak Mendukung	-	-
21	Bagaimanakah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?		
	a. Sangat baik	4	14.81
	b. Baik	20	74.07
	c. Cukup baik	3	11.11
	d. Kurang baik	-	-
	e. Tidak baik	-	-
22	Bagaimanakah laju pertumbuhan ekonomi?		
	a. Sangat tinggi	7	25.93
	b. tinggi	12	44.44
	c. Cukup tinggi	6	22.22
	d. Rendah	2	7.41
	e. Sangat Rendah	-	-

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
23	Bagaimanakah tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat? a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik	2 3 21 1 -	7.41 11.11 77.78 3.70 -
24	Menurut saudara, bagaimanakah struktur ekonomi masyarakat ? a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik	4 4 13 5 1	14.81 14.81 48.15 18.52 3.70
25	Menurut saudara, bagaimanakah rasio jumlah penduduk usia produktif ? a. Sangat tinggi b. tinggi c. Cukup tinggi d. Rendah e. Sangat Rendah	- - - 13 14	- - - 48.15 51.85
26	Bagaimanakah rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja ? a. Sangat tinggi b. tinggi c. Cukup tinggi d. Rendah e. Sangat Rendah	3 3 17 4 -	11.11 11.11 62.96 14.81 -
27	Bagaimanakah tingkat ketersediaan naker yg sudah berpengalaman sebagai naker pada sektor kegiatan usaha secara formal? a. Sangat tinggi b. tinggi c. Cukup tinggi d. Rendah e. Sangat Rendah	7 6 8 6 -	25.93 22.22 29.63 22.22 -
28	Menurut saudara, bagaimanakah besar upah yang ditetapkan pemerintah? a. Sangat Sesuai b. Sesuai	8 5	29.63 18.52

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
	c. Cukup Sesuai	2	7.41
	d. Tidak Sesuai	12	44.44
	e. Sangat tidak Sesuai	-	-
29	Bagaimanakah biaya tenaga kerja secara actual dalam dunia usaha?		
	a. Sangat Sesuai	4	14.81
	b. Sesuai	4	14.81
	c. Cukup Sesuai	-	-
	d. Tidak Sesuai	12	44.44
	e. Sangat tidak Sesuai	7	25.93
30	Bagaimanakah tingkat produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut ?		
	a. Sangat tinggi	4	14.81
	b. tinggi	21	77.78
	c. Cukup tinggi	-	-
	d. Rendah	1	3.70
	e. Sangat Rendah	1	3.70
31	Bagaimanakah ketersediaan infrastruktur untuk transportasi darat?		
	a. Sangat Memadai	-	-
	b. Memadai	16	59.26
	c. Cukup Memadai	3	11.11
	d. Kurang Memadai	4	14.81
	e. Tidak Memadai	4	14.81
32	Bagaimanakah ketersediaan infrastruktur untuk sarana komunikasi?		
	a. Sangat Memadai	7	25.93
	b. Memadai	3	11.11
	c. Cukup Memadai	13	48.15
	d. Kurang Memadai	3	11.11
	e. Tidak Memadai	1	3.70
33	Bagaimanakah ketersediaan infrastruktur untuk penerangan?		
	a. Sangat Memadai	4	14.81
	b. Memadai	14	51.85
	c. Cukup Memadai	5	18.52
	d. Kurang Memadai	3	11.11
	e. Tidak Memadai	1	3.70

No	Pernyataan/Pertanyaan	Jawaban	
		f	%
34	Menurut saudara, bagaimanakah kualitas infrastruktur fisik ?		
	a. Sangat baik	4	14.81
	b. Baik	7	25.93
	c. Cukup baik	11	40.74
	d. Kurang baik	5	18.52
	e. Tidak baik	-	-
35	Menurut saudara, bagaimanakah kualitas infrastruktur untuk sarana komunikasi?		
	a. Sangat Memadai	5	18.52
	b. Memadai	6	22.22
	c. Cukup Memadai	8	29.63
	d. Kurang Memadai	8	29.63
	e. Tidak Memadai	-	-
36	Menurut saudara, bagaimanakah kualitas infrastruktur untuk penerangan?		
	a. Sangat Memadai	-	-
	b. Memadai	3	11.11
	c. Cukup Memadai	6	22.22
	d. Kurang Memadai	8	29.63
	e. Tidak Memadai	10	37.04

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008

Dari hasil penyebaran angket yang hasilnya seperti terlihat pada Tabel 4.3 di atas persepsi responden yang dalam hal ini adalah pelaku usaha perhotelan di Kota Batu adalah sebagai berikut :

- Pemberlakuan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mengatur kehidupan berusaha sudah konsisten,
- Tingkat pelayanan oleh aparat pemerintah terhadap dunia usaha sudah baik,
- Peraturan Daerah mendukung kegiatan dunia usaha,
- Keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha sudah baik,
- Etos kerja masyarakat cukup baik,
- Pengaruh adat istiadat masyarakat cukup mendukung dunia usaha,

- Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sudah baik,
- Laju pertumbuhan ekonomi cukup baik.
- Tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat cukup baik
- Struktur ekonomi masyarakat cukup baik,
- Rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja cukup tinggi,
- Tingkat produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut tinggi,
- Infrastruktur untuk transportasi darat memadai,
- Ketersediaan infrastruktur untuk sarana komunikasi cukup memadai,
- Ketersediaan infrastruktur untuk penerangan memadai

Berdasarkan jawaban responden tersebut di atas bahwa pelaku investasi khususnya pelaku investasi dalam bidang perhotelan menilai bahwa iklim investasi di Kota Batu cukup kondusif sebagai tempat untuk melakukan investasi, karena di dukung oleh indikator-indikator sebagaimana dikemukakan, yaitu bahwa peraturan daerah, aparat pemerintah dan birokrasi sangat mendukung bagi aktivitas dunia usaha. Demikian pula keadaan masyarakat baik budaya, kualitas dan kesiapannya dalam bekerja merupakan factor yang berperan dalam mendukung kegiatan dunia usaha.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kota Batu adalah faktor sosial politik dimana faktor tersebut mendapat prioritas tertinggi bagi investor sehingga memperoleh bobot dan peringkat tertinggi. Faktor kondisi sosial politik ini didukung oleh variabel keamanan sebagai variabel utama yaitu sebesar 0,50% dan kedua variabel lainnya yakni sosial politik dan budaya masyarakat masing-masing sebesar 25%. Hal ini terjadi karena suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat dan kondisi politik yang kondusif bagi dunia usaha.
2. Komponen pembentuk faktor daya tarik investasi di Kota Batu adalah variabel keamanan sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh factor kondisi social politik dan budaya masyarakat. Adanya jaminan keamanan yang sangat mendukung kegiatan para investor berkat kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kecepatan aparat keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan menyebabkan daerah ini sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dan membawa keuntungan bagi kegiatan investasi.

5.2 Saran

Atas dasar hasil penelitian ini peneliti menyampaikan beberapa saran :

1. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan senantiasa dapat menyusun peraturan daerah yang dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang baik.
2. Pemerintah dapat menyediakan data dan informasi terkini mengenai peluang investasi daerah, agar tidak investasi di bidang perhotelan saja yang berkembang namun investor di bidang lainpun dapat berkembang.
3. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi daerah.
4. Layanan perbankan agar memperhatikan dan mengakomodir kondisi dan keperluan pengusaha yaitu birokrasi dan prosedur yang lebih sederhana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan demikian akan semakin meningkatkan iklim investasi yang akan lebih membuka peluang bagi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, M. Idris. 2006. *Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan – UM. Diakses dari <http://www.ekofeum.or.id>.

BKPM, 2005. <http://www.bkpm.go.id>.

Brodjonegoro, Bambang 2000, *Otonomi Daerah Dan Kondisi Fiskal Indonesia*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Expert Choice inc Pennsylv Vania. 1992. Version 8.0 User Manual.

Gaspersz Vincent. 1990. *Analisis Kualitatif untuk Perencanaan*. Bandung : Tarsito.

Kadarsah Suryadi & M. Ali Ramdhani. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

KPPOD, 2002. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*.

Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajat. 2004a. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.

Kuncoro, M. 2004b. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN

Kuncoro, M. 2004c. *Trend dan Strategi Menarik Investasi ke Daerah dalam Lokakarya Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi*. Hotel Sahid Raya. Yogyakarta, 9-10 Agustus 2004. Tidak Dipublikasikan

Kuncoro, Mudrajad. 2005a. *Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10 No.2, 2005.

Kuncoro, Mudrajad. 2005b. *Menanti Reformasi Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia*. Harian Kompas, 24 Januari 2005. Online dalam <http://www.mudrajad.com>.

Kustituantio, Bambang dan Istikomah. 1998. *Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 14 No 2.

- Makmun. 2004. *Potret Perekonomian Daerah*. Harian Kompas 25 Maret 2004. Online dalam <http://www.kompas.com>.
- Marbun, B.N. 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal ekonomi Rakyat, Nomor 4 – Juli 2002.
- Nurmiyanto, Eko. 1994. Perumusan strategi kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT. Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra. Online <http://puslit.petra.ac.id/>
- Permadi, Bambang, 1992a. *AHP*. Terjemahan oleh Liana Setiono. Jakarta : Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Permadi, Bambang. 1992b. *Memutuskan dengan Analytic Hierarchy Process*. Pusat Antar Universitas — Studi Ekonomi, UI, Jakarta.
- REDI dan PEG. 2003. *Survei: Persepsi Pelaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah*. Surabaya: REDI.
- Render, Barry dan Ralph M. Stair Jr. 2000. *Quantitative Analysis for Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Malang. Bayumedia Publishing.
- Sarwedi. 2002. *Investasi Asing Langsung di Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 17 – 35, Online dalam <http://www.petra.ac.id>.
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sinaga, D. 2006. *Iklim Investasi di Indonesia*. Program Pnsca Sajana UPI YAI. Online dalam www.untad.org

KUISIONER

Faktor Kelembagaan

Variabel Kepastian Hukum

1. Menurut saudara apakah pemberlakuan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mengatur kehidupan berusaha sudah konsisten?
 - a. Sangat konsisten
 - b. konsisten
 - c. Cukup konsisten
 - d. Tidak konsisten
 - e. Sangat tidak konsisten
2. Menurut saudara, apakah proses penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan dunia usaha sudah konsisten?:
 - a. Sangat konsisten
 - b. konsisten
 - c. Cukup konsisten
 - d. Tidak konsisten
 - e. Sangat tidak konsisten
3. Menurut saudara, apakah biaya-biaya tidak resmi di luar birokrasi (oleh preman)
 - a. Sangat meresahkan
 - b. Meresahkan
 - c. Cukup meresahkan
 - d. Kurang meresahkan
 - e. Tidak meresahkan
4. Menurut saudara, bagaimanakah dampak hubungan antara DPRD dengan Pemda terhadap dunia usaha?
 - a. Sangat baik
 - b. baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik

Variabel Aparatur dan Pelayanan

5. Menurut saudara, bagaimanakah tingkat pelayanan oleh aparat pemerintah terhadap dunia usaha?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
6. Menurut saudara, bagaimanakah kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan terkait dengan dunia usaha?
 - a. Sangat jelas
 - b. Jelas
 - c. Cukup Jelas
 - d. Kurang Jelas
 - e. Tidak Jelas

Variabel Kebijakan Daerah / Peraturan Daerah

7. Menurut saudara, bagaimanakah Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan kegiatan dunia usaha?
 - a. Sangat Mendukung
 - b. Mendukung
 - c. Cukup Mendukung
 - d. Kurang Mendukung
 - e. Tidak Mendukung

Variabel Keuangan Daerah

8. Menurut saudara, struktur pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah :
 - a. Sangat jelas
 - b. Jelas
 - c. Cukup Jelas

- d. Kurang Jelas e. Tidak Jelas
9. Menurut saudara, bagaimanakah konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan daerah?
- a. Sangat Konsisten b. Konsisten c. Cukup Konsisten
- d. Kurang Konsisten e. Tidak Konsisten

Faktor Sosial Politik

Variabel Keamanan

10. Menurut saudara, bagaimanakah tingkat keamanan terhadap dunia usaha :
- a. Sangat Aman b. Aman c. Cukup Aman
- d. Kurang Aman e. Tidak Aman
11. Menurut saudara, konflik sosial dalam masyarakat :
- a. Sangat Mengganggu b. Mengganggu c. Cukup Mengganggu
- d. Kurang Mengganggu e. Tidak Mengganggu
12. Menurut saudara, bagaimanakah kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan :
- a. Sangat Tanggap b. Tanggap c. Cukup Tanggap
- d. Kurang Tanggap e. Tidak Tanggap

Variabel Sosial Politik

13. Menurut saudara, bagaimanakah keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha?
- a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik e. Tidak Baik
14. Menurut saudara, konflik politik :
- a. Sangat Mengganggu b. Mengganggu c. Cukup Mengganggu
- d. Kurang Mengganggu e. Tidak Mengganggu
15. Menurut saudara, bagaimanakah stabilitas politik di daerah ini?
- a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik e. Tidak Baik
16. Bagaimanakah kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat?
- a. Sangat Tinggi b. Tinggi c. Cukup Tinggi
- d. Rendah e. Sangat Rendah

Variabel Budaya

17. Menurut saudara, bagaimanakah keterbukaan masyarakat terhadap masuknya dunia usaha?
- a. Sangat Terbuka b. Terbuka c. Cukup Terbuka

- d. Kurang Terbuka e. Tidak Terbuka
18. Menurut saudara, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap suatu investasi usaha?
- a. Sangat Mendukung b. Mendukung c. Cukup Mendukung
d. Kurang Mendukung e. Tidak Mendukung
19. Menurut saudara, bagaimanakah etos kerja masyarakat?
- a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik
d. Kurang Baik e. Tidak Baik
20. Menurut saudara, bagaimanakah pengaruh adat istiadat terhadap produktivitas usaha?
- a. Sangat Mendukung b. Mendukung c. Cukup Mendukung
d. Kurang Mendukung e. Tidak Mendukung

Faktor Ekonomi Daerah

Variabel Potensi Ekonomi

21. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?
- a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik
d. Kurang Baik e. Tidak Baik
22. Menurut saudara, bagaimanakah laju pertumbuhan ekonomi?
- a. Sangat tinggi b. Tinggi c. Cukup tinggi
d. Rendah e. Sangat rendah
23. Bagaimanakah tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat?
- a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik
d. Kurang Baik e. Tidak Baik

Variabel Struktur Ekonomi

24. Menurut saudara, bagaimanakah struktur ekonomi masyarakat ?
- a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik
d. Kurang Baik e. Tidak Baik

Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas

Variabel Ketersediaan tenaga kerja

25. Menurut saudara, bagaimanakah rasio jumlah penduduk usia produktif ?
- a. Sangat tinggi b. Tinggi c. Cukup tinggi
d. Rendah e. Sangat rendah

26. Menurut saudara, bagaimanakah rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja ?

- a. Sangat tinggi
- b. Tinggi
- c. Cukup tinggi
- d. Rendah
- e. Sangat rendah

27. Bagaimanakah tingkat ketersediaan naker yg sudah berpengalaman sebagai naker pada sektor kegiatan usaha secara formal?

- a. Sangat tinggi
- b. Tinggi
- c. Cukup tinggi
- d. Rendah
- e. Sangat rendah

Variabel Biaya Tenaga Kerja

28. Menurut saudara, bagaimanakah besar upah yang ditetapkan pemerintah ?

- a. Sangat sesuai
- b. sesuai
- c. Cukup sesuai
- d. Tidak sesuai
- e. Sangat tidak sesuai

29. Bagaimanakah biaya tenaga kerja secara actual dalam dunia usaha?

- a. Sangat sesuai
- b. sesuai
- c. Cukup sesuai
- d. Tidak sesuai
- e. Sangat tidak sesuai

Variabel Produktivitas Tenaga Kerja

30. Menurut saudara, bagaimanakah tingkat produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut ?

- a. Sangat tinggi
- b. Tinggi
- c. Cukup tinggi
- d. Rendah
- e. Sangat rendah

Faktor Infrastruktur

Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik

31. Menurut saudara, bagaimanakah ketersediaan infrastruktur untuk transportasi darat?

- a. Sangat memadai
- b. memadai
- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

32. Menurut saudara, bagaimanakah ketersediaan infrastruktur untuk sarana komunikasi?

- a. Sangat memadai
- b. memadai
- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

33. Menurut saudara, bagaimanakah ketersediaan infrastruktur untuk penerangan?

- a. Sangat memadai
- b. memadai
- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

Variabel Kualitas Infrastruktur Fisik

34. Menurut saudara, bagaimanakah kualitas infrastruktur fisik ?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik
- e. Tidak Baik

35. Menurut saudara, bagaimanakah kualitas infrastruktur untuk sarana komunikasi?

- a. Sangat memadai
- b. memadai
- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

36. Menurut saudara, bagaimanakah kualitas infrastruktur untuk penerangan?

- a. Sangat memadai
- b. memadai
- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

